



UIN SUSKA RIAU

IMPLEMENTASI PROGRAM FORUM KOMUNIKASI RT/RW DI KECAMATAN TUAH MADANI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Sipidang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

PINTA ARISMAN

NIM. 12170521829

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

TAHUN 2025

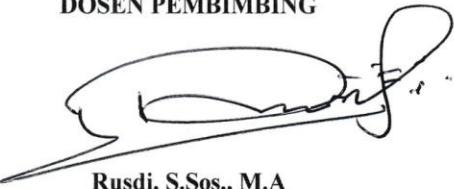


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Pinta Arisman
Nim : 12170521829
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING



Rusdi, S.Sos., M.A

NIP. 19720306 200710 1 002

Mengetahui

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara



Dr. Desriz Miftah, S.E, M.M., Ak

NIP. 19740412 200604 2 002



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

arif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pinta Arisman
Nim : 12170521829
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani
Tanggal Ujian : Rabu, 17 September 2025

Tim Pengaji

Ketua pengaji
Ferizal Rachmad, S.E., M.M
NIP. 19750216 201411 1 001

Pengaji I
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001

Pengaji II
Syed Agung Afandi, M.I.P
NIP. 19950618 202012 1 010

Sekretaris
Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si
NIP: 19840717 202521 1 024

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pinta Arisman
NIM : 12170521829
Tempat/Tgl. Lahir : Sumur Batu / 12 April 2003
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi program forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan



NIM : 12170521829

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM FORUM KOMUNIKASI RT/RW DI KECAMATAN TUAH MADANI

Oleh :

PINTA ARISMAN

NIM : 12170521829

Email : 12170521829@students.uin-suska.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan serta mengidentifikasi implementasi program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani. Forum ini dibentuk sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyalur aspirasi masyarakat, namun dalam praktiknya belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial-ekonomi-politik, serta sikap pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi forum masih tergolong kurang maksimal. Program kerja forum lebih banyak bersifat insidental dan cenderung fokus pada kegiatan sosial, sementara aspek strategis seperti pelatihan administrasi, literasi digital, dan penguatan kapasitas kelembagaan belum dilaksanakan. Hambatan utama dalam pelaksanaan forum antara lain rendahnya partisipasi pengurus (hanya ±30% yang aktif), ketiadaan anggaran operasional, lemahnya komunikasi antar lembaga, kekosongan kepemimpinan, dominasi kelompok tertentu, serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lokal. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga turut memperlemah berlangsungnya forum.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, forum komunikasi RT/RW, partisipasi masyarakat, Van Meter dan Van Horn, Kecamatan Tuah Madani.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

IMPLEMENTATION OF THE RT/RW COMMUNICATION FORUM PROGRAM IN TUAH MADANI SUB-DISTRICT

By:

PINTA ARISMAN

NIM: 12170521829

Email: 12170521829@students.uin-suska.ac.id

This study aims to analyze the implementation and identify the inhibiting factors of the RT/RW Communication Forum program in Tuah Madani Sub-district. The forum was established as a medium for communication, coordination, and channeling community aspirations; however, in practice, it has not functioned optimally. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which consists of six main variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of the implementing body, social-economic-political environment, and the disposition of implementers.

The findings show that the implementation of the forum remains less than optimal. Most of the forum's programs are incidental and focus mainly on social activities, while strategic aspects such as administrative training, digital literacy, and institutional capacity building have not been realized. The main obstacles include low participation of forum members (only about 30% are active), absence of operational funding, weak inter-agency communication, leadership vacancies, dominance of certain groups, and suboptimal coordination with local institutions. Moreover, social, economic, and political conditions further weaken the sustainability of the forum.

Keywords: Policy implementation, RT/RW Communication Forum, community participation, Van Meter and Van Horn, Tuah Madani Sub-district.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

© Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip Al-Qur'an atau Kitab Kuningan
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya penulis tanpa menanyakan dasar dan menyebutkan sumber:

Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

IMPLEMENTASI PROGRAM FORUM KOMUNIKASI RT/RW DI KECAMATAN TUAH MADANI” dengan baik, serta shalawat dan salam baginda Nabi Muhammad SWA yang telah membawa umat manusia

kepada kehidupan yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak sekali
kekurangan dalam penulisan-Nya dan masih jauh dari kata sempurna, tentunya
penulis memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, oleh karena itu kritik dan
sarana sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.
oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Keluarga terkasih, Ayahanda Masri dan Ibunda Risnawati sumber segala
semangat dan kekuatan penulis yang tiada henti mendoakan dan
mendukung dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan untuk anak
keduanya ini. Suami tercinta Adhitya Triranof Putra, yang selalu hadir
memberikan semangat, do'a, dukungan, kesabaran dan pengertian tanpa
henti dalam setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta



UIN SUSKA RIAU

kepada Abang dan Adek penulis, Ananda Putra Utama dan Vanesa

2. Oktavia yang peduli tanpa pamrih dan membantu tanpa henti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

7. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

8. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.si selaku Ketua Program Studi
S1 Administrasi Negara dan Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc. Sc
selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

9. Bapak Rusdi, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah
banyak membantu dan memberikan saran, masukan dan semangat kepada
penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

9. Ibu Devi Deswimar, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, do'a dan bimbingannya kepada penulis selama perkuliahan.
10. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Hmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak, Ibuk, Kakak dan Abang yang berada di Kantor Camat Tuah Madani, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Sidomulyo Barat yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitian skripsi ini.
12. Kepada Sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan ANA 21 D yang membersamai penulis selama di perkuliahan.

Semoga segala dorongan, semangat, do'a dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis juga berharap agar tesis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Aamiin aamiin ya abbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 2 September 2025

Penulis

Pinta Arisman

Nim. 12170521829

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

| | |
|--|------|
| DAFTAR ISI | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 2 Rumusan Masalah..... | 16 |
| 3 Tujuan Penelitian | 16 |
| 4 Manfaat Penelitian | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| 2.1. Defenisi Kebijakan..... | 19 |
| 2.2. Defenisi Kebijakan Publik | 20 |
| 2.3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik | 21 |
| 2.4. Relevansi Teori Model Van Meter dan Van Horn dalam Penelitian | 27 |
| 2.5. Organisasi Komunikasi | 29 |
| 2.6. Fungsi Organisasi Komunikasi | 30 |
| 2.7. Forum Komunikasi RT & RW | 32 |
| 2.8. Dasar Hukum dan Tugas Forum RT/RW dan LPM..... | 36 |
| 2.9. Pandangan Islam tentang Kebijakan Publik..... | 38 |
| 2.10. Penelitian Terdahulu | 41 |
| 2.11. Defenisi Konsep..... | 43 |
| 2.12. Konsep Operasional | 45 |
| 2.13. Kerangka Berpikir | 46 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 47 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 47 |
| 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian | 47 |
| 3.3 Informan dan Key Informan penelitian..... | 47 |
| 3.4 Teknik Pengambilan Sampel | 48 |

Hak Cipta milik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah
Dilarang menggabungkan dengan anggaran dan mengadaptasi
1. Dilarang menggabungkan dengan anggaran dan mengadaptasi
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilanggar
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|------------|
| 3.5 Sumber Data Penelitian..... | 49 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 54 |
| 3.7 Teknik Analisa Data..... | 62 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 65 |
| 4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru | 65 |
| 4.1.1. Letak Geografis dan Administratif..... | 65 |
| 4.1.2. Luas Wilayah dan Kependudukan | 67 |
| 4.1.3. Aspek Demografi | 69 |
| 4.1.4. Perekonomian dan Pembangunan | 71 |
| 4.1.5. Infrastruktur dan Pelayanan Publik | 73 |
| 4.2. Sejarah Ringkas Kecamatan Tuah Madani | 75 |
| 4.3. Sejarah Ringkas Kelurahan Sidomulyo Barat..... | 77 |
| 4.4. Sejarah Ringkas Kelurahan Tuah Karya | 80 |
| 4.5. Sejarah Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan Tuah Karya .. | 84 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 87 |
| 5.1.Pelaksanaa Implementasi Forum Komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani | 87 |
| 5.1.1. Standar dan Sasaran Kebijakan | 87 |
| 5.1.2. Sumber Daya | 99 |
| 5.1.3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana..... | 110 |
| 5.1.4. Karakteristik Badan Pelaksana..... | 122 |
| 5.1.5. Lingkungan : Sosial, Ekonomi dan Politik | 133 |
| 5.1.6. Sikap Pelaksanaan | 147 |
| 2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Implemantasi Forum Komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani | 157 |
| BAB VI PENUTUP | 161 |
| 6.1. Kesimpulan | 161 |
| 6.2. Saran..... | 164 |
| DAFTAR PUSTAKA | 167 |
| LAMPIRAN | |



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn | 26 |
| Kegiatan Rapat Forum | 88 |
| Bank Sampah sekaligus Kantor Forum Kelurahan Tuah Karya | 100 |
| Grup Ketua Forum Sekecamatan | 101 |
| Kantor Sekretariat LPM dan Forum Kelurahan Sidomulyo Barat..... | 102 |
| Aula (Ruang Rapat) Kecamatan Tuah Madani | 110 |
| Daftar Hadir Rapat Kecamatan | 111 |
| SK Ketua Forum Kelurahan Tuah Karya..... | 123 |
| Struktur Forum Kelurahan Tuah Karya | 127 |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sarjana Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | |
|---|--|-----|
| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | 1 | |
| 1. Dilakukan mengenai sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber | 1 | |
| a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 1 | |
| b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 1 | |
| 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | 1 | |
| DAFTAR TABEL | | |
| Tabel 1-1 | Program Forum Komunikasi RT-RW Kecamatan Tuah Madani | 12 |
| Tabel 3-1 | Jumlah Informan dalam Penelitian | 48 |
| Tabel 4.1-1 | Pembagian Wilayah Administratif Kota Pekanbaru Tahun 2024 | 66 |
| Tabel 4.1-2 | Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru per Kecamatan Tahun 2023 | 68 |
| Tabel 4.1-3 | Komposisi Demografi Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2023..... | 70 |
| Tabel 4.1-4 | Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2023 (Harga Berlaku)..... | 72 |
| Tabel 4.1-5 | Perkembangan Infrastruktur Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023..... | 73 |
| Tabel 4.1-6 | Jenis Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dan Ketersediaannya | 75 |
| Tabel 4.2-1 | Kronologi Sejarah Pembentukan Kecamatan Tuah Madani | 77 |
| Tabel 4.2-1 | Kronologis Perkembangan Kelurahan Sidomulyo Barat | 80 |
| Tabel 4.2-1 | Kronologis Perkembangan Kelurahan Tuah Karya | 83 |
| Tabel 4.2-1 | Kronologi Perkembangan Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan Tuah Madani..... | 86 |
| Tabel 5.1-1 | Intensitas Rapat Koordinasi Forum RT/RW dengan Kelurahan/Kecamatan | 112 |
| Tabel 5.1-2 | Evaluasi Peran dan Tanggung Jawab Anggota Forum Komunikasi RT/RW | 128 |
| Tabel 5.1-3 | Tingkat Dukungan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Lokal terhadap Forum RT/RW | 140 |
| Tabel 5.1-4 | Pengaruh Politik Lokal terhadap Keberlangsungan Forum RT/RW | 144 |



UIN SUSKA RIAU

Tabel 5.1-5

| | |
|--|-----|
| Tanggapan Pengurus Forum terhadap Kebijakan Pemerintah | 153 |
| Faktor Penghambat Implementasi Forum Komunikasi RT/RW Kecamatan Tuah Madani..... | 160 |
| Matriks Penguhubung | 163 |

Tabel 5.1-1

Tabel 6.1-1

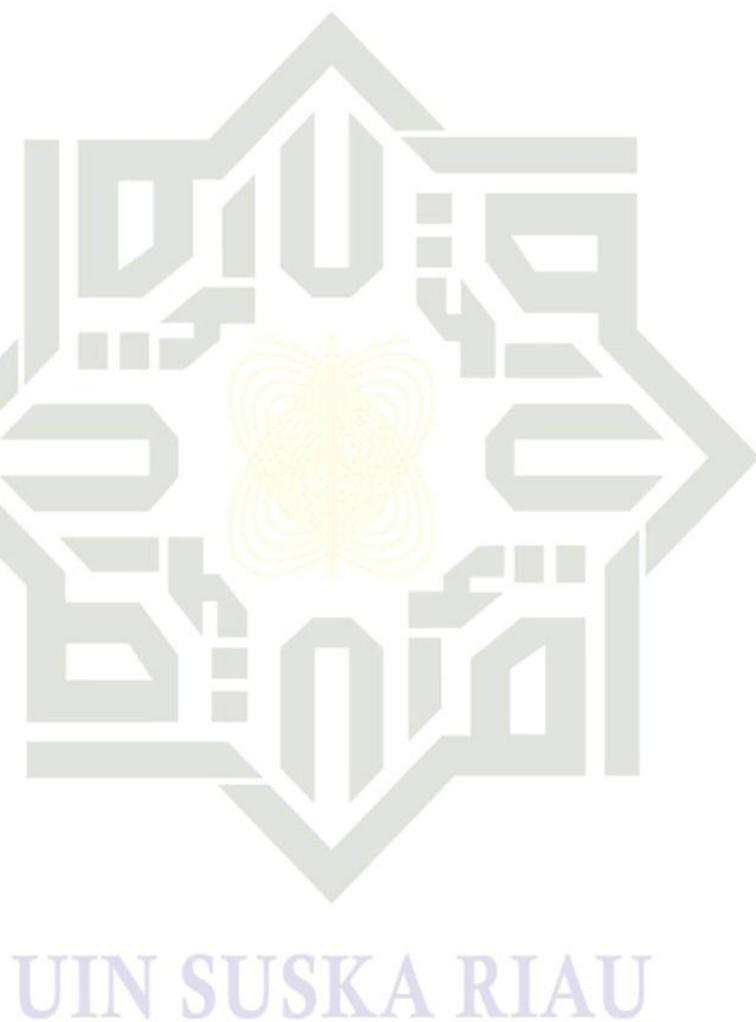
Tabel 6.1-1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilakukan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

Eksplorasi Belakang Masalah

Komunikasi merupakan sebuah aktivitas dasar yang dilakukan oleh manusia (Al-Halabi, 2016). Zaman sekarang komunikasi dapat dilakukan kapan dan dimana komunikasi saat ini memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan hal karena komunikasi merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, komunikasi dibutuhkan dalam suatu lembaga maupun organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik maka sebuah organisasi akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan dan akan mendapatkan keberhasilan. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan terdapat hal yang terjadi dalam pekerjaan, terlebih lagi akan munculnya suatu struktur organisasi yang tidak teratur (Rifa'i, 2023).

Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik, mulai dari komunikasi verbal dan non-verbal. Dengan komunikasi seseorang dapat menyampaikan pesan berupa informasi, ide, gagasan, fakta, pemikiran, dan menyampaikan perasaan kepada orang lain. Dalam memahami komunikasi langkah terbaiknya adalah berusaha memaknai unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi, terdiri dari pengirim (komunikator), penerima (komunikan), pesan, saluran komunikasi dan efek yang terjadi dari komunikasi tersebut (Siregar dan Usriyah, 2021).

Kunci dalam komunikasi yang sukses adalah terdapat unsur-unsur atau elemen-elemen komunikasi didalamnya, yaitu komunikator, komunikan, pesan dan efek.



juga media. media yang dapat digunakan dalam berkomunikasi juga beragam, bisa

1. Berkembangnya media digital maupun media cetak Apalagi dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, terdapat banyak perubahan-perubahan ke arah yang lebih maju. Manusia dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa bertatapan secara langsung (Andini, 2024).
2. Dilarang mengungkapkan sifat-sifat barang atau perbuatan yang tidak diperlukan sebagai pertanda kesalahan dalam berkomunikasi dapat menjadi kesalahan yang fatal, dan menjadi kesalahan yang tepat Sasaran. Menurut Klaresta (2020) dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan tombak utama dalam kesuksesan bekerja, baik itu antara ketua dengan anggota, anggota dengan anggota, atau pun pihak organisasi dengan pihak luar (Klaresta, 2020).

Sebagai suatu instansi pemerintahan atau pun organisasi menjadikan komunikasi sebagai alat untuk memberi atau menerima informasi dari pihak lain. Kesalahan dalam berkomunikasi dapat menjadi kesalahan yang fatal, dan menjadi kesalahan yang tepat Sasaran. Menurut Klaresta (2020) dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan tombak utama dalam kesuksesan bekerja, baik itu antara ketua dengan anggota, anggota dengan anggota, atau pun pihak organisasi dengan pihak luar (Klaresta, 2020).

Sistem seperti RT/RW sebenarnya punya akar di zaman penjajahan Belanda, dengan istilah seperti wijkmeester (pengurus wilayah). Setelah Indonesia merdeka, sistem ini dilanjutkan dan disesuaikan dengan nilai gotong royong. Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi menetapkan RT dan RW sebagai struktur organisasi masyarakat di tingkat paling bawah (lingkungan). Disebutkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bahwa salah satu elemen yang turut berperan membantu tugas-tugas pemerintahan dalam mensukseskan otonomi daerah adalah lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai lembaga mitra pemerintah yang siap bekerja sama yang harmonis dan dinamis (Pekanbaru, 2016).



Secara hukum nasional, kedudukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga

1. Dilarang mengelihingi Undang-Undang Cipta Karya tulis intelektual dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh RT dan RW. Pengelihingan ini dapat berupa pelanggaran terhadap hak cipta atau hak lainnya. Pelanggaran ini dapat berupa pengambilan tanpa izin, penyalahgunaan, atau penyebarluasan tanpa izin.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Secara hukum nasional, kedudukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga telah diatur dalam regulasi pemerintah. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menggolongkan RT dan RW sebagai Lembaga Kerjasama Desa yang menjadi mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat lokal (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Artinya, eksistensi RT/RW memiliki landasan yuridis sebagai organisasi masyarakat di tingkat paling bawah yang berfungsi membantu tugas pemerintahan setempat.

Forum RT & RW dibentuk untuk membantu pemerintah dalam melakukan berbagai program kerja yang telah disusun. Kelurahan sebagai pengarah dari RT & RW membentuk sebuah organisasi forum komunikasi RT & RW sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Forum Komunikasi RT & RW yang dibentuk ini melakukkan pertemuan rutin untuk membahas segala permasalahan dan juga program kerja yang akan dilangsungkan oleh sebuah Kelurahan. Peran RT & RW sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah atau urusan masyarakat yang berjenjang ke tingkat Kelurahan dan kecamatan (Pimpinan, 2022).

Forum Komunikasi RT/RW sendiri dibentuk sebagai wadah koordinasi antara pengurus RT/RW dengan pemerintah. Kelurahan bertindak sebagai pembina yang memfasilitasi forum ini agar menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wadah komunikasi publik, forum RT/RW memungkinkan tersalurnya aspirasi masyarakat dari tingkat lingkungan kepada pemerintah secara lebih terstruktur (Zuhdi, 2019). Dengan demikian, forum ini berfungsi sebagai jembatan dua arah: menyosialisasikan



kebijakan pemerintah kepada warga sekaligus menampung dan meneruskan aspirasi kepada pemerintah (Zuhdi, 2019). Peran strategis tersebut menjadikan forum RT/RW sebagai elemen penting dalam mensukseskan program-program pemerintah di lingkungan lokal.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk tertinggi. Pada tahun 2022, kota ini mempunyai populasi penduduk yang tinggi mencapai 1.107.327 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2022), mempunyai kepadatan penduduk 1,800/km pada tahun 2022. Kota Pekanbaru menjadi pusat administrasi di Provinsi Riau dan salah satu pusat perekonomian di Sumatra. Sehingga banyak pendatang dalam lokal, nasional atau internasional menggantungkan hidup disini. Pengurusan permohonan administrasi pendudukan masuk rata-rata 100, sedangkan permohonan keluar 65 (Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, 2022).

Forum RT/RW adalah sebuah wadah atau organisasi yang dibentuk untuk membumikan dan menyuarakan aspirasi masyarakat di kecamatan agar proses penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud. Forum RT/RW juga dibentuk untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Forum RT/RW kecamatan Tuah Madani pertahun 2022 tercatat sebanyak 97 Rukun Warga (RW) dan 439 Rukun Tetangga (RT). Jadi total keseluruhan ketua RT/RW yang tergabung dalam Forum RT/RW ini berjumlah 536 orang. Forum ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Tujuan dibentuknya Forum ini adalah untuk membangun silaturahmi dan komunikasi antar ketua RT/RW yang ada sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang ada di kecamatan Tuah Madani (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru).



komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kelurahan atau kecamatan dengan

Forum ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta untuk menyampaikan informasi penting terkait program-program

akan dilaksanakan di tingkat RT/RW. Kecamatan Tuah Madani, yang terletak di

Kota Pekanbaru, menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi forum komunikasi

selama lima tahun terakhir. Bahkan dalam proses Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang), pengurus forum RT/RW kerap diikutsertakan sebagai

delegasi warga untuk menyampaikan usulan pembangunan, sehingga kebutuhan

warga di akar rumput dapat terakomodasi dalam rencana pembangunan daerah

(Anwar, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana fungsi

referensi ini dapat berperan dalam mendukung pembangunan di daerah tersebut

(Kurniawan, 2020)

Program-program yang direncanakan oleh Forum Komunikasi RT RW

Statistik Mahasiswa dilakukan untuk mendekati hasil yang diinginkan.

apa
man I
sum
mini

in tan
Borran
Un
ßR:
Zentrum für Soziale Zusammenarbeit, Sozialarbeit und Politik - ZSP der Fach

Padam, dilanjutkan Pelatihan Administrasi RT-RW tidak terlaksana, maka dapat
dilakukan penundaan pelaksanaan pelatihan.

menimbulkan sejumlah dampak negatif. Kegagalan pelaksanaan Cyber Education

berpotensi memperlebar kesenjangan digital di tengah masyarakat, sehingga warga

kesulitan mengakses informasi dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

hari. Ketidakterlaksananya sosialisasi aplikasi E-Lapor akan menyebabkan minimnya

partisipasi warga dalam menyampaikan laporan atau aspirasi, yang pada akhirnya



berdampak pada lambatnya penanganan masalah lingkungan. Sementara itu, jika

1. Peliharaan administrasi RT-RW tidak dijalankan, maka akan melemahkan tata kelola pelatihan administrasi di tingkat lingkungan, menghambat transparansi, dan menurunkan kualitas pelayanan masyarakat.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya ilmiah hasil inovasi dan penciptaan dan menyebarkan ke dalam media sosial.

Untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi strategis di atas, Forum Komunikasi

menyusun berbagai program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik di lingkungan lokal. Program-program

direncanakan oleh forum ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan publik berbasis komunitas.

Setiap program kerja dirumuskan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata

dihadapi warga, sehingga relevan dengan konteks lokal masing-masing. Berikut

beberapa contoh program kerja Forum Komunikasi RT/RW beserta tujuannya:

Cyber Education

Program peningkatan literasi digital bagi warga. Melalui Cyber Education, forum berupaya mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, internet, dan media digital. Tujuannya adalah memperkecil kesenjangan digital antarwarga sehingga mereka tidak tertinggal dalam akses informasi dan layanan digital. Peningkatan literasi digital ini memberdayakan masyarakat agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menggunakan platform digital (misalnya aplikasi pemerintah) dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sosialisasi Aplikasi E-Lapor

Program pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi E-Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dicanangkan pemerintah daerah. Forum



RT/RW mengadakan kegiatan ini untuk mendorong partisipasi warga dalam mendekamplikasi aspirasi, keluhan, atau laporan tentang isu-isu lingkungan mereka melalui platform digital resmi. Dengan meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan dan umpan balik, diharapkan respons pemerintah terhadap permasalahan tersebut akan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Program ini secara langsung memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di tingkat lokal.

Pelatihan Administrasi RT/RW

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di level RT/RW, terutama dalam hal administrasi dan tata kelola. Pelatihan ini mencakup pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan surat-menyurat resmi, pengarsipan, hingga manajemen laporan pertanggungjawaban keuangan sederhana di tingkat RT/RW. Tujuan pelatihan adalah meningkatkan kompetensi para Ketua RT/RW dan pengurusnya dalam melaksanakan tugas administrasi publik, sehingga pelayanan terhadap warga menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan administrasi yang lebih baik, RT/RW diharapkan mampu mendukung terciptanya good governance mulai dari tingkat paling bawah.

Sosialisasi dan Penguatan Partisipasi Pemilu

Program peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Forum RT/RW memfasilitasi sosialisasi mengenai hak pilih, tata cara pemilu, serta mendorong warga untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal maupun nasional. Kegiatan ini bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai pemilih yang cerdas dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilu di suatu masalah.



lingkungan setempat. Dengan partisipasi politik yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat

1. Dilebih terwakili dalam hasil-hasil politik dan kebijakan pemerintah ke depan.

Pelatihan Kewirausahaan Kreatif

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan
ekonomi kreatif atau usaha kecil lokal. Forum RT/RW dapat bekerjasama
dengan dinas terkait atau lembaga swasta untuk memberikan bimbingan keterampilan
wirausaha, manajemen usaha, hingga akses permodalan bagi warga. Tujuan program
adalah mendorong kemandirian ekonomi warga dan menciptakan peluang usaha di
komunitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi
masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Program Sosial (Pembagian Sembako Gratis)

Program bantuan sosial yang dilakukan forum, misalnya pembagian paket
sembako gratis bagi warga kurang mampu atau pada saat terjadi keadaan darurat
(seperti bencana alam atau masa pandemi). Inisiatif ini menunjukkan peran forum
dalam menggerakkan solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan RT/RW.
Tujuannya adalah meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan sekaligus
mempererat hubungan antarwarga melalui budaya gotong royong dan saling bantu.

Program-program di atas mencerminkan upaya Forum Komunikasi RT/RW
untuk merespons kebutuhan nyata masyarakat lokal, baik di bidang peningkatan
kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, partisipasi politik, pemberdayaan ekonomi,
maupun jaring pengaman sosial. Secara umum, seluruh program tersebut disusun
guna memberdayakan masyarakat (*community empowerment*) dan mendorong
partisipasi publik yang lebih aktif dalam pembangunan. Relevansi program-program



ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan bila program tidak dijalankan. *Cyber Education*, misalnya, sangat penting untuk dilaksanakan agar kesenjangan digital di masyarakat tidak semakin melebar; tanpa edukasi digital semacam ini warga kesulitan mengakses informasi dan memanfaatkan teknologi, sehingga akhirnya kesempatan menyampaikan laporan dan aspirasi akan minim, dan hal ini berdampak pada pengembangan lingkungan masyarakat. Demikian pula, tanpa sosialisasi aplikasi E-Lapor, partisipasi dalam menyampaikan laporan dan aspirasi akan minim, dan hal ini berdampak pada pengembangan lingkungan masyarakat. Adapun pelatihan administrasi RT/RW merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan kelola administrasi di tingkat lokal berjalan baik; apabila pelatihan ini tidak dilakukan, tata kelola administrasi lingkungan dapat melemah, transparansi terhambat, dan kualitas pelayanan kepada warga menurun. Berbagai contoh tersebut menggaskan bahwa program-program kerja Forum RT/RW dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemitraan antara warga dan pemerintah daerah.

Pada akhirnya, implementasi program kerja Forum Komunikasi RT/RW yang efektif akan berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan partisipatif di tingkat lokal. Melalui forum ini, masyarakat diberdayakan untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pelaku yang berinisiatif mengatasi persoalan di lingkungannya. Dengan forum yang aktif dan program kerja yang relevan, pemerintah kelurahan dan kecamatan memperoleh mitra strategis dalam menggerakkan partisipasi warga, sehingga prinsip good governance suatu masalah.



dan pembangunan yang berorientasi pada komunitas dapat diwujudkan secara nyata

1. Dilarang mengelipit sebagian

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga Tingkat Kelurahan,

Kecamatan dan Tingkat Kota Pekanbaru, dalam pasal 7 disebutkan Tugas dari

Forum komunikasi forum RT & RW dalam membantu pemerintah kota pekanbaru

melaksanakan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota pekanbaru. Tugas Forum

komunikasi RT & RW tingkat kota pekanbaru adalah melaksanakan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar

Forum komunikasi RT & RW dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk

Masalah utama yang muncul dalam pelaksanaan forum komunikasi RT-RW di

Kecamatan Tuah Madani adalah kurangnya koordinasi antara pengurus RT/RW

dengan pemerintah kecamatan. Dapat kita lihat dari Ketua forum jarang diajak rapat

dalam masalah sampah, kesehatan, hukum dan lain sebagainya, bahkan pada tahun

2020 ketua forum tidak pernah diajak rapat di kecamatan. Hal ini mengakibatkan

ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan,

baik di bidang sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Bahkan dalam bagian karsipan

forum komunikasi RT/RW ini tidak memiliki karsipan yang jelas. Selain itu,

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan forum juga menjadi isu yang

cukup signifikan. Banyak warga yang tidak menyadari pentingnya keberadaan forum

ini dan tidak aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan, sehingga mempengaruhi

masalah.

2. Pengutipan

Untuk

Tantuk

Forum

komunikasi

RT & RW

dalam

melaksanakan

urusan

pembangunan,

sosial

kemasyarakatan

dan

pemberdayaan

masyarakat

baik

di

tingkat

kelurahan,

kecamatan

dan

kota

pekanbaru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

kota

pek

baru

adalah

melaksanakan



efektivitas forum dalam mengatasi masalah-masalah di tingkat RT dan RW

1. Dilarang mengajukan saran atau perbaikan terhadap peraturan daerah (Darwisyah, 2025).

Dan masalah yang terjadi pada saekarang ini adalah hasil pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Riau, ditemukan adanya praktik maladministrasi dalam pemberhentian Syamsu Burman sebagai Ketua RT 06 RW 10 oleh Lurah Air Zubir Yahya. Keputusan tersebut dinilai cacat prosedur, tidak berdasarkan hukum yang jelas, serta tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru dan Peraturan Daerah (Riaupunya.com,2025).

Keterbatasan sumber daya juga menjadi salah satu tantangan besar bagi forum komunikasi ini. Pengurus RT/RW sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai, kurangnya fasilitas yang mendukung kelancaran kegiatan forum. Tanpa pelatihan yang baik, pengurus kesulitan dalam mengorganisir kegiatan dan mengatasi berbagai masalah yang muncul di lingkungan mereka. Hal ini tentu saja mengurangi potensi maksimal dari forum komunikasi dalam meningkatkan kualitas hidup warga (Kecamatan Tuah Madani Darwisyah, 2025).

Namun, efektivitas kinerja forum RT/RW sangat bergantung pada implementasi tugas dan fungsi yang semestinya dijalankan. Penelitian Zuhdi, Ferizko, dan Melinda (2019) di Pekanbaru menunjukkan bahwa kelembagaan RT/RW belum berfungsi optimal karena terbatasnya pembinaan dan pelatihan bagi pengurusnya mesalnya dalam hal birokrasi, tata kelola, dan administrasi pemerintahan sehingga banyak ketua RT/RW belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawab mereka (Zuhdi, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa forum RT/RW perlu mengimplementasikan program-program peningkatan kapasitas bagi anggotanya, batinjauan suatu masalah.



seperti pelatihan administrasi, literasi digital, dan penguatan kompetensi kepemimpinan. Dengan mengagendakan pelatihan dan pendampingan tersebut, dapat diperkuat profesionalisme pengurus RT/RW dapat meningkat dan berbagai program (misalnya *Cyber Education*, sosialisasi aplikasi layanan publik, dan kerjanya) dapat terlaksana dengan lebih optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas kerjanya akan mendukung terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tuah Madani secara lebih efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk mengevaluasi apakah ini dapat berfungsi secara optimal dengan adanya hambatan-hambatan tersebut.

Berikut merupakan berbagai program forum komunikasi RT-RW pada kecamatan
Madani :

Tabel 1.1-1 Program Forum Komunikasi RT-RW Kecamatan Tuah Madani

| Nama Program | Tujuan | Indikator | Status | Bukti | Sumber Data |
|---|---|---|----------------|-------|--|
| Cyber Education Penyaluran: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru | Meningkatkan literasi digital pengurus RT/RW: mampu mengoperasikan smartphone, WhatsApp Group, dan Zoom untuk komunikasi/rapat sejalan dengan Perwako Pekanbaru | 1-2 kelas pelatihan + pendampingan daring; target peserta 39 ketua (8 RW + 31 RT) di Kel. Tuah Madani, tersusunnya <i>manual book</i> penggunaan ponsel/aplikasi, | Belum berjalan | - | Proposal PKM Unilak “Cyber Education” untuk Forum RT/RW Kelurahan Tuahmadani ” (Feb |



| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | | No. 152/2017 yang mensyaratkan ketua RT/RW mampu mengoperasikan smartphone. | WAG RT/RW aktif respons bisa bergabung rapat via Zoom. | | | 2023) |
|--|---|---|--|--|--|---|
| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip a. Pengutipan hanya berdasarkan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | Program Pengelolaan Sampah Berbasis RT/RW | Mendorong partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan bank sampah, gotong royong, dan sosialisasi pemilahan sampah rumah tangga agar tercipta lingkungan sehat dan bernilai ekonomi. | Minimal 1 bank sampah aktif di setiap RW; terlaksananya gotong royong kebersihan; adanya kegiatan sosialisasi pemilahan sampah; jumlah warga penyetor sampah ke bank sampah meningkat. | Sudah Berjalan (terbatas di beberapa RW) | Dokumentasi Bank Sampah Tuah Karya (difungsikan juga sebagai kantor forum) dan foto kegiatan gotong royong lingkungan. | Dokumentasi Forum RT/RW & Laporan Kelurahan Tuah Karya. |
| | Pelatihan Administrasi RT/RW | Meningkatkan kapasitas administrasi (arsip data warga, surat-menyurat, pelaporan, buku register) bagi ketua RT/RW sehingga pelayanan lebih tertib/standar. | Bimtek untuk 39 ketua (8 RW + 31 RT) Kel. Tuah Madani indikator: tiap RT/RW punya buku administrasi standar & mampu menyusun laporan bulanan. (Jumlah RT/RW mengacu data Kel. Tuah | Belum Berjalan | - | Basis perencanaan internal Forum; referensi jumlah RT/RW: dokumen Unilak (8 RW, 31 RT). |



| ©Hak cipta milik UIN Suska Riau | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|--|
| State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | | | | | |
| a. Pengadaan Sembako Gratis di Lingkungan RT/RW | Membantu keluarga kurang mampu terdampak pandemi melalui penyaluran paket sembako gratis di lingkungan RT/RW. | Madani). | Sudah Berjalan | Berita resmi Pemko (15 Apr 2020). | Berita resmi Pekanbaru.g o.id: "RT 02 RW 06 Tuah Madani Bagikan Sembako Gratis". |
| b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar | | | Sudah Berjalan | Beita kegiatan sosialisasi pemilu. | Berita Pekanbaru.g o.id & media lokal (Detil.co, Marwah Riau). |
| 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | Sosialisasi & Pengembangan Partisipasi Pemilu Sosialisasi & Pengembangan Partisipasi Pemilu dengan menyebutkan sumber: Penulis, Penyaya iiliah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau | Mengajak warga terutama pemilih pemula hadir di TPS dan menjaga kondusifitas bentuk kegiatan: sosialisasi langsung/online, spanduk & pamflet, penyampaian ke sekolah serta koordinasi via RT/RW. | Sosialisasi oleh Pemcam/PPK Tuah Madani (Okt–Nov 2024) Camat target partisipasi ~85% (per pernyataan Camat); imbauan disebar melalui Forkompimcam, BKMT, PKK, pengurus masjid, serta RT/RW. | | |
| Belatihan Kewirausahaan dan Kreatif | Memberdayakan ekonomi warga (UMKM/ibu-ibu/pekerjaan suatu masalah. | seminar/pelatihan UMKM di Kantor Camat Tuah | Sudah Berjalan | Berita kegiatan (kampus/ | Universitas Pahlawan (MoU & |



| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| <p>(UMKM)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis <i>inheren</i> tanpa mencantumkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan dan tafsiran. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Sumber: <i>Diolah Penulis, 2025</i></p> | <p>muda) melalui pelatihan produksi, manajemen usaha, pemasaran/digital marketing.</p> | <p>Madani (26 Mar 2024) pelatihan UMKM komunitas di Tuah Madani (29 Des 2024) terdapat MoU/kerja sama Kelurahan Universitas untuk pendampingan UMKM (10 Ags 2023).</p> | <p>media lokal) MoU kelurahan–universitas.</p> | <p>seminar Tuah Madani) dan OjeNews (pelatihan UMKM di Tuah Madani)</p> |
|---|---|--|--|--|---|

Dengan menganalisis berbagai permasalahan yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan pelaksanaan fungsi Forum Komunikasi RT-RW di Kecamatan Tuah Madani, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan di tingkat lokal.

Berdasarkan fakta-fakta diatas perlu dilakukan penelitian untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana forum ini menjalankan fungsinya, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peran forum dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, Forum Komunikasi RT RW dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi masyarakat. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Forum Komunikasi Rt/Rw Di Kecamatan Tuah Madani.”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana yang diketahui pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalahnya

sebagaimana pelaksanaa implementasi forum komunikasi RT RW Kecamatan Tuah

Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan implemantasi forum

komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian

adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaa fungsi forum komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani?

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi forum komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani?

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi dalam dua aspek utama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada umumnya dan Administrasi Pembangunan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada umumnya dan Administrasi

Pembangunan pada khususnya.



2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

2. Dilarang menggunakan dan memperbaiki hasil penelitian ini untuk referensi dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan tema yang sama. Selain itu, peneliti bisa mengembangkan kemampuan dalam mencari solusi untuk masalah yang ada di masyarakat.

bagaimana bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana seharusnya Forum Komunikasi RT RW bekerja untuk mereka. Masyarakat bisa lebih paham tentang hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi di forum ini.

Bagi pengurus RT RW

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk memperbaiki cara kerja mereka dalam mengelola forum. Mereka bisa mengetahui kekurangan yang ada dan caranya mengatasinya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya. Pengurus RT RW juga bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat program kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

disulisi Bagi pemerintah Kecamatan Tuah Madani

Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana Forum Komunikasi RT RW berjalan selama ini. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang lebih baik dalam mendukung kegiatan forum. Selain itu, pemerintah kecamatan juga bisa



mengetahui masalah apa saja yang perlu diperbaiki agar forum bisa bekerja lebih efektif dalam melayani masyarakat.

© Mak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Efek Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Kebijakan

Di era modern saat ini, kebijakan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang, seperti kesejahteraan sosial, kesehatan, perumahan, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya (Pramono, 2020). Menurut Robert Eyeston, kebijakan publik secara luas dapat diartikan sebagai hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Proses kebijakan dapat digambarkan sebagai rangkaian perubahan yang mencakup tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan. Dengan kata lain, proses tersebut adalah rangkaian peristiwa dinamis yang saling berkaitan (Pramono, 2020).

Kebijakan merupakan tindakan administrasi negara yang bersumber dari kewenangan diskresi dan umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan sebagai pelaksanaan undang-undang. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa peraturan kebijakan pada dasarnya adalah produk tindakan tata usaha negara yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan tertulis dan berfungsi sebagai bagian dari operasionalisasi tugas pemerintah, tanpa mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan (Pramono, 2020). Kebijakan juga dapat dipahami sebagai rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan tindakan, kepemimpinan, dan cara bertindak, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, sektor swasta, maupun individu (Pramono, 2020).



2.2. Defenisi Kebijakan Publik

Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan dan peluang yang harus diatasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Pramono, 2020). Sementara itu, David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara sah dan mengikat kepada seluruh masyarakat (Pramono, 2020).

Thomas R. Dye juga memberikan pandangan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup keputusan pemerintah baik untuk bertindak maupun tidak bertindak terhadap suatu isu (Pramono, 2020).

Dari beberapa definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama kebijakan publik, yaitu:

Kebijakan publik umumnya berfokus pada tindakan yang memiliki tujuan tertentu bukan sekadar tindakan acak.

Kebijakan publik mencakup rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, bukan sekadar tindakan sporadic.

Kebijakan publik adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan perumahan, bukan sekadar rencana atau niat .

Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Positif berarti pemerintah melakukan tindakan tertentu untuk menangani suatu masalah, sedangkan negatif melakukannya tanpa izin UIN Suska Riau.



berarti pemerintah memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun meskipun hasil tersebut memerlukan intervensi .

Kebijakan publik umumnya didasarkan pada hukum dan bersifat mengikat. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pada tahap analisis kebijakan, proses analisis sangat penting untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, sehingga dapat disimpulkan apakah kebijakan tersebut efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.

Secara umum, kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh suatu lembaga pemerintah atau pejabat publik untuk dijadikan pedoman bagi aparatur pemerintahan dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah kebijakan sering kali digunakan untuk merujuk pada berbagai konsep seperti tujuan, program, keputusan, peraturan, usulan, atau rencana strategis (Pramono, 2020).

2.3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Memurut Tachjan (2006), implementasi kebijakan publik dapat dipahami melalui beberapa model yang dikembangkan untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Model-model tersebut antara lain:

Model Top-Down (Atas ke Bawah)

Model ini berfokus pada pihak pembuat kebijakan sebagai aktor utama dalam proses implementasi. Instruksi kebijakan disampaikan dari tingkat pusat ke tingkat pelaksana lapangan dengan asumsi bahwa pelaksana akan mengikuti instruksi tersebut tanpa penyimpangan.



b. Model *Bottom-Up* (Bawah ke Atas)

- Berbeda dengan model *top-down*, model bottom-up melihat implementasi dari standang pelaksana di lapangan. Model ini menekankan pentingnya partisipasi kebijakan dan kelompok sasaran dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
1. Dilarang mengambil sebagian atau seluruh karyanya
 - a. Pengutipan untuk kepentingan sendiri
 - b. Pengutipan tidak mungkin kepentingan yang wajar
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Model *Hybrid* (Campuran)

- Model ini mencoba menggabungkan pendekatan *top-down* dan bottom-up mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang proses implementasi. Model hybrid mempertimbangkan peran aktor dari tingkat pusat hingga pelaksana lapangan serta interaksi antara keduanya.

d. Model Sistemik

- Model ini melihat implementasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling berkaitan, seperti sumber daya, struktur organisasi, komunikasi, dan lingkungan eksternal.

e. Model Evolusioner

- Implementasi kebijakan dilihat sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang. Kebijakan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil implementasi di lapangan dan masukan dari para pelaksana dan kelompok sasaran.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenai model-model implementasi kebijakan publik berdasarkan Tachjan (2006):



a. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

- Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi sejumlah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap pelaksanaan dan kinerja kebijakan. Variabel-variabel tersebut adalah:
1. Dilarang menulis tentang atau pelaksanaan kebijakan, baik dalam bentuk konkret maupun abstrak, serta pengukuran hasil akhir program dapat diukur secara spesifik, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar dan sasaran kebijakan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui program atau kebijakan, baik dalam bentuk konkret maupun abstrak, serta dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan sasaran ini sangat penting agar hasil akhir program dapat diukur secara spesifik, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal.

Dalam Program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani, standar dan sasaran kebijakan mencakup tujuan yang ingin dicapai, baik dalam bentuk konkret maupun abstrak, serta dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan spesifikasi sasaran sangat penting agar hasil program dapat diukur secara efektif, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Jika standar dan sasaran tidak jelas, maka pengukuran keberhasilan program akan sulit dilakukan dan potensi hambatan semakin besar.

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup dukungan finansial dan sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Tantangan utamanya adalah menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja kebijakan yang optimal. Evaluasi program harus mampu mengukur efisiensi dari sumber daya yang digunakan.



Program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani

1. Dibutuhkan dukungan anggaran, fasilitas, dan tenaga pelaksana yang kompeten.

2. Sumber daya finansial dan sumber daya manusia merupakan elemen penting untuk mendukung implementasi program. Jika alokasi anggaran minim atau sumber daya tidak memadai, maka implementasi program akan terhambat. Evaluasi efisiensi penggunaan sumber daya diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dimanfaatkan secara optimal.

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi antara pihak pelaksana merujuk pada prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan program. Mekanisme komunikasi ini harus dirumuskan secara termasuk frekuensi pertemuan, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Selain itu, komunikasi antar organisasi juga mencerminkan pentingnya koordinasi dan dukungan institusi terkait dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi antara badan pelaksana dalam program ini merujuk pada koordinasi antara RT/RW, aparat kecamatan, dan dinas terkait. Jika komunikasi tidak efektif, misalnya melalui prosedur yang tidak jelas, minimnya rapat koordinasi, atau lemahnya aliran informasi, maka pelaksanaan program akan terganggu. Hambatan komunikasi dapat berakibat pada kesalahpahaman atau duplikasi tugas antar pihak terkait, sehingga perlu ada mekanisme komunikasi yang jelas dan efektif.

Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana merujuk pada kapasitas struktur organisasi, nilai-nilai yang dianut, serta pola hubungan dan komunikasi internal dalam birokrasi yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.



Badan pelaksana program terdiri dari pengurus RT/RW, aparat kecamatan,

1. **Asasitor** program. Struktur organisasi, kapabilitas pengurus, serta pola hubungan dan komunikasi internal akan mempengaruhi kelancaran implementasi program. Jika struktur organisasi tidak jelas atau kompetensi pelaksana rendah, maka program akan sulit berjalan efektif, sehingga hambatan dapat semakin meningkat.
2. Dilarang menganggap sebagai program yang unggul dan penting untuk mendidik, pengembangan dan komunikasi internal akan mempengaruhi kelancaran implementasi program. Jika struktur organisasi tidak jelas atau kompetensi pelaksana rendah, maka program akan sulit berjalan efektif, sehingga hambatan dapat semakin meningkat.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Tuah Madani berpotensi menjadi faktor penghambat implementasi program. Misalnya, konflik kepentingan antar RT/RW, tingkat ekonomi warga yang menyebabkan partisipasi menurun, atau intervensi politik yang menghambat pelaksanaan forum. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan untuk menentukan strategi mitigasi yang tepat agar implementasi program berjalan lancar.

Sikap Pelaksana

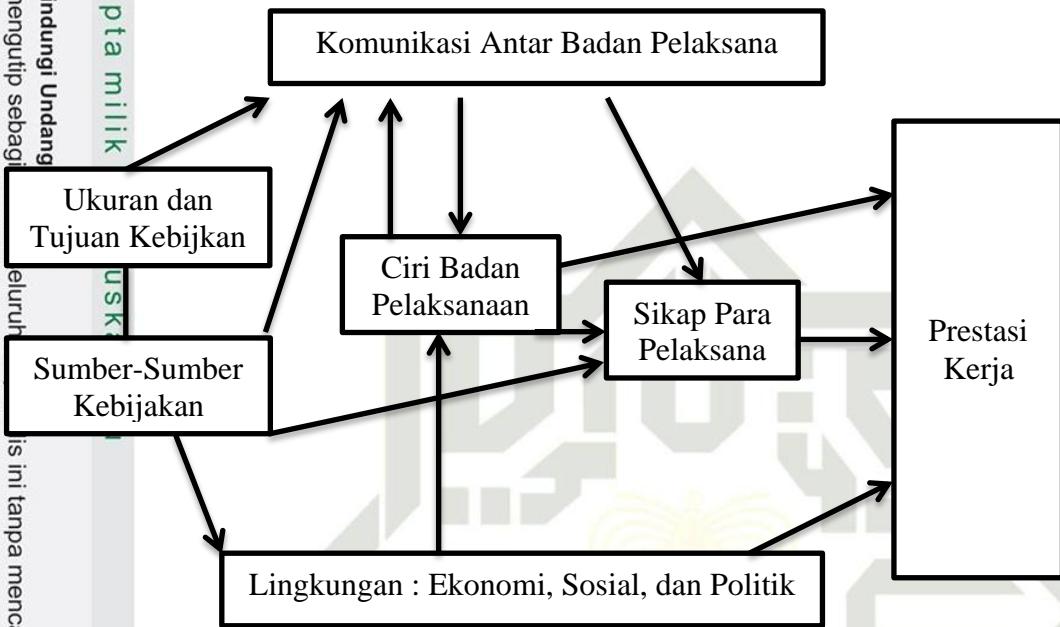
Sikap pelaksana merupakan elemen penting yang mencakup seberapa demokratis, antusias, dan responsif mereka terhadap kelompok sasaran serta lingkungan di sekitarnya. Sikap tersebut akan berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan.

Sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan program Forum Komunikasi RT/RW. Jika pelaksana tidak responsif terhadap aspirasi warga, tidak antusias, atau bersikap acuh tak acuh, maka keberhasilan program akan terancam. Sebaliknya, sikap bersikap suatu masalah.



yang proaktif, terbuka, dan responsif akan memperkuat implementasi program dan minimasi hambatan yang mungkin terjadi.

Gambar 2.3-1 Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber : Tachjan (2006)

Model Sabatier dan Mazmanian (1979)

Model ini menekankan pentingnya proses implementasi kebijakan sebagai rangkaian aktivitas yang harus dikelola secara sistematis. Terdapat beberapa faktor perlu diperhatikan:

1. Kejelasan kebijakan
2. Dukungan dari kelompok kepentingan
3. Stabilitas kondisi sosial-politik
4. Kemampuan implementor dalam menerjemahkan kebijakan

1. Mencipta Dilindungi Undang-Undang
a. Mengatur mengutip sebagai
b. Pengutipan hanya untuk
c. Pengutipan tidak merugikan
d. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengutipan hanya untuk
a. Pengutipan hanya untuk
b. Pengutipan tidak merugikan
c. Pengutipan tidak merugikan
d. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Model Elmore (1980)

Model ini berfokus pada pendekatan bottom-up, yaitu pendekatan yang implementasi kebijakan dari perspektif pelaksana di lapangan. Elmore menganggap bahwa kebijakan akan lebih efektif jika pelaksana memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal.

d. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Model ini mengembangkan pendekatan feedback dalam proses implementasi. Fokus utama adalah memastikan bahwa proses implementasi tidak hanya dilakukan tetapi juga memerlukan evaluasi dan umpan balik untuk melakukan perbaikan kebijakan.

e. Model Grindle (1980)

Grindle melihat implementasi kebijakan sebagai proses politik yang dipengaruhi oleh kepentingan berbagai aktor. Beberapa faktor yang dianggap penting oleh Grindle antara lain:

1. Konten kebijakan
2. Konteks implementasi
3. Proses negosiasi antar aktor
4. Dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran

2.4. Relevansi Teori Model Van Meter dan Van Horn dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn sebagai landasan teoritis untuk menganalisis pelaksanaan program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani. Model ini relevan karena memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas suatu masalah.



implementasi suatu kebijakan atau program berdasarkan enam variabel utama: standar

1. Dukungan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana kebijakan.
2. Dilarang mengambil hak cipta dan penggunaan Undang-Undang serta disposisi atau sikap pelaksana kebijakan.

Forum Komunikasi RT/RW sebagai representasi kebijakan pemerintah daerah memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan bahwa program-program forum seperti *Cyber Education*, *Aplikasi E-Lapor Tuah Madani*, dan *Pelatihan Administrasi RT-RW* sepenuhnya terlaksana. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan dalam sumber daya, komunikasi antar lembaga, serta sikap atau komitmen pelaksana program.

Model Van Meter dan Van Horn menjadi alat analisis yang tepat untuk mengurai masalah-masalah tersebut secara sistematis. Misalnya, hambatan komunikasi antara ketua forum dengan pemerintah kecamatan yang berdampak pada perencanaan program, serta lemahnya partisipasi masyarakat, dapat dianalisis melalui variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan fasilitas pengurus forum menunjukkan lemahnya dukungan sumber daya, yang juga merupakan variabel penting dalam model ini.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn tidak hanya membantu menjelaskan mengapa pelaksanaan program Forum Komunikasi RT/RW belum optimal, tetapi juga memberikan petunjuk tentang faktor-faktor yang perlu dibenahi agar implementasi program berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penggunaan model ini

menjaga suatu masalah.



dalam penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana

1. **Harak Cipta** **Biilinduji Undang-Undang**
dapat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat.
2. **Dilarang mengemban** **Organisasi Komunikasi**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan cenderung hidup dalam masyarakat. Mereka mengatur dan mengorganisasikan kegiatan bersama dengan tujuan yang sama. Namun, keterbatasan kemampuan individu membuat mereka tidak dapat mencapai tujuan tersebut tanpa kerja sama. Oleh karena manusia ter dorong untuk hidup dalam organisasi (Zuriah, 2018).

Joseph A. DeVito menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam kelompok baik yang bersifat formal maupun informal. Komunikasi dalam organisasi bisa terjadi di antara kelompok formal atau informal yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi organisasi hanya berlaku dalam konteks internal organisasi, dan tidak berlaku di luar organisasi itu sendiri.

Memurut R. Wayne Pace dan Don F. Faules, komunikasi organisasi merupakan perilaku yang terjadi dalam pengorganisasian di dalam suatu organisasi, di mana mereka yang terlibat dalam proses tersebut saling melakukan transaksi dan memberikan makna terhadap kejadian yang berlangsung. Oleh karena itu, komunikasi organisasi dapat dipahami sebagai pengiriman dan penerimaan informasi dalam suatu organisasi yang memiliki struktur kompleks (Irmayani & Kaliky, Nur, 2020).

Zelko dan Dance menyebutkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sistem yang saling terhubung. Terdapat dua jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu

salah.



komunikasi eksternal dan internal. Komunikasi ini tidak hanya ditujukan untuk pihak

- organisasi, namun juga bisa melibatkan pihak luar organisasi (Robert Tua et al., 2021).

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah proses pengiriman pesan, baik formal maupun informal, dalam kelompok yang terjadi dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi, dengan tujuan yang sama. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada perilaku manusia yang bekerja dalam organisasi tersebut.

Dalam praktik organisasi, komunikasi yang efektif merupakan prasyarat untuk menciptakan kerja sama yang baik demi mencapai tujuan organisasi (Hartini dkk., 2022). Namun, meskipun demikian, komunikasi tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh setiap organisasi.

2.6. Fungsi Organisasi Komunikasi

Menurut Sendjaja, organisasi komunikasi memiliki empat fungsi utama yang dijelaskan oleh Jumrad & Mayang Sari (2019) sebagai berikut:

a) Fungsi Informatif

Organisasi dapat dipandang sebagai sistem yang mengolah informasi (information processing system), di mana setiap anggota organisasi diharapkan memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih akurat, dan tepat waktu. Dengan informasi tersebut, anggota organisasi dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih pasti.



b. Fungsi Regulatif

- Fungsi ini berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Ada faktor-faktor yang memengaruhi fungsi ini. Pertama, pengawasan oleh atasan atau pihak manajemen yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan informasi. Kedua, pesan yang bersifat regulatif yang bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang peraturan pekerjaan, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

c. Fungsi Persuasif

- Dalam organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak selalu menghasilkan hasil diinginkan. Banyak pemimpin yang lebih memilih untuk mempersuasi bawahannya daripada memberikan perintah langsung. Pekerjaan yang dilakukan sukarela sering kali menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan dengan perintah kekuasaan.

d. Fungsi Integratif

- Organisasi berusaha menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan karyawan menjalankan tugas dengan lebih baik. Terdapat dua jenis saluran komunikasi yang dapat mendukung hal ini: saluran komunikasi formal, seperti penerbitan internal (newsletter, bulletin) dan laporan kemajuan organisasi; serta saluran komunikasi informal, seperti percakapan antarpribadi saat istirahat kerja. Dengan adanya saluran komunikasi ini, diharapkan karyawan akan lebih ter dorong untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi.



2.7. Forum Komunikasi RT & RW

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang melakukan kegiatan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan penulis.
 - a. Pengutipan harusnya umumnya kebutuhan pentingan pendidikan, penelitian, penulisan dan lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. H. Sultan Syarif Kasim Km. 1,5 Lubuk Pakam, Riau 28292
Telp. (071) 411212 | Fax. (071) 411213
E-mail: ppid@uin-suska.ac.id

Menurut Koentjaraningrat, lembaga kemasyarakatan adalah sistem tata kelola dan hubungan yang berfokus pada aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan manusia. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, kemasyarakatan merupakan kumpulan norma yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat (Rauf, 2015).

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), disebutkan bahwa salah satu elemen penting dalam mendukung tugas pemerintahan mewujudkan otonomi daerah adalah lembaga RT dan RW sebagai mitra pemerintah yang siap bekerja sama secara harmonis dan dinamis (Pekanbaru, 2016).

Forum RT & RW dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah disusun. Kelurahan bertindak sebagai pengarah bagi RT & RW dan membentuk organisasi Forum Komunikasi RT & RW yang menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Forum ini mengadakan pertemuan rutin untuk membahas berbagai permasalahan dan program kerja yang akan diaksanakan oleh Kelurahan. Peran RT & RW sangat dibutuhkan dalam menangani masalah masyarakat yang melibatkan tingkat Kelurahan dan Kecamatan (Pimpinan, 2022).

Forum Komunikasi RT & RW membahas dan mendiskusikan berbagai isu dan permasalahan di wilayah masing-masing, seperti sarana dan prasarana infrastruktur, administrasi, kependudukan, kesehatan, kebersihan, penanganan banjir, perencanaan program kerja, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Semua permasalahan



ini didiskusikan dalam forum yang telah dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah

1. Harap Forum RT & RW dapat berperan aktif dalam mendukung program yang disusun. Keberadaan forum ini diharapkan dapat membantu tugas-tugas pemerintah, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan berharap mengelip sebagian warga untuk berpartisipasi dalam persinggungan langsung dengan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Forum RT & RW berfungsi sebagai wadah perantara antara pemerintah dan masyarakat. Forum ini juga berperan sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program-program pemerintah pusat kini sudah saatnya melibatkan pengurus RT & RW secara langsung sebagai operator atau petugas di lapangan, setelah mereka mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang intensif. Program seperti sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, penyuluhan agama, kesehatan, hingga pengampingan keluarga harapan, sebaiknya melibatkan pengurus RT & RW sebagai petugas lapangan. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberikan informasi yang lebih akurat kepada pemerintah mengenai kondisi terkini masyarakat, karena pengurus RT & RW adalah yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat (Zuhdi et al., 2019).

Forum Komunikasi RT/RW merupakan wadah organisasi di tingkat lokal yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam perspektif teori komunikasi organisasi, efektivitas suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh kelancaran arus komunikasi vertikal maupun horizontal di dalamnya. Forum RT/RW



inilah yang menyediakan saluran komunikasi formal tersebut, menghubungkan pemerintah kelurahan/kecamatan dengan para pengurus RT/RW di lingkungan masing-masing. Melalui forum ini, informasi mengenai kebijakan atau program pemerintah dapat tersampaikan secara jelas hingga tingkat paling bawah, sementara pengutipan dan kebutuhan warga di tingkat RT/RW dapat diakomodasi dan disalurkan ke pemerintah secara terstruktur.

Secara regulasi, pembentukan Forum Komunikasi RT/RW diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016. Peraturan ini menegaskan bahwa RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Pasal 7 peraturan tersebut disebutkan bahwa Forum Komunikasi RT/RW bertugas membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. Artinya, forum ini memiliki fungsi strategis untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan pelaksanaannya di lapangan, memastikan program-program pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif melalui peran aktif RT dan RW.

Dalam praktiknya, Forum Komunikasi RT/RW menyelenggarakan pertemuan rutin sebagai media koordinasi. Berbagai isu lokal dibahas bersama dalam forum ini, mulai dari permasalahan sarana prasarana lingkungan, administrasi kependudukan, kesehatan masyarakat, kebersihan, penanganan banjir, hingga rencana program pemberdayaan masyarakat. Melalui diskusi kolektif, para Ketua RT/RW dapat menyampaikan kendala atau kebutuhan yang dihadapi warga di wilayahnya, ataupun suatu masalah.

sementara aparat kelurahan/kecamatan memberikan arahan atau sosialisasi program dijalankan. Pemerintah sangat berharap forum ini berperan aktif mendukung program-program pembangunan yang telah disusun, mengingat RT/RW adalah lembaga pihak yang paling dekat interaksinya dengan masyarakat. Dalam hal ini, forum sebagai wahana koordinasi lintas-RT/RW dan sekaligus sebagai simpul kunci antara birokrasi pemerintah dengan komunitas warga di tingkat akar rumput.

Melalui fungsi-fungsinya tersebut, Forum Komunikasi RT/RW menjadi elemen kunci dalam struktur pemerintahan lokal. Forum ini berperan sebagai *intermediary* yang menyelaraskan komunikasi dua arah mulai dari pemerintah ke masyarakat (*top-down*) berupa sosialisasi kebijakan atau instruksi program, dan dari masyarakat ke pemerintah (*bottom-up*) berupa umpan balik, aspirasi, serta partisipasi warga. Dengan demikian, keberadaan Forum RT/RW memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat ditampung dan diperjuangkan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah secara lebih terorganisir. Singkatnya, Forum Komunikasi RT/RW berfungsi sebagai wadah strategis komunikasi dan koordinasi, yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis dan dinamis antara pemerintah dan warga pada level lokal. Fungsi ini sejalan dengan tujuan pembentukannya, yaitu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan sinergi antara RT/RW, serta menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam kerangka kemitraan pemerintah dan masyarakat.



2.8. Dasar Hukum dan Tugas Forum RT/RW dan LPM

- Forum Komunikasi RT/RW di Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016. Peraturan tersebut menetapkan Forum RT/RW sebagai “wahana yang dibentuk dan difasilitasi oleh kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas lembaga RT dan RW yang merupakan mitra kelurahan dan kecamatan dalam memberdayakan masyarakat”. Sementara itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005. Perda tersebut menetapkan pembentukan LPM di kelurahan dengan kedudukan sebagai mitra pemerintah dalam bidang pembangunan. Dengan demikian, kedua lembaga ini memiliki dasar hukum masing-masing yang menegaskan kedudukan dan fungsi utamanya.

Forum Komunikasi RT/RW memiliki fungsi utama sebagai wadah koordinasi antara pengurus RT/RW dan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Pasal 4 Perwako No. 64/2016 menyebutkan tujuan pembentukan Forum RT/RW, antara lain “memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat” serta “meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat di wilayahnya masing-masing”. Selanjutnya, Pasal 7 Perwako 64/2016 merinci tugas Forum Komunikasi RT/RW, terutama di tingkat kota, yang di antaranya meliputi: (a) “melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru” sesuai ketuntuan perundang-undangan; dan (b) “memelihara ketentraman dan



ketertiban masyarakat serta memberikan saran dan masukan pada penyusunan “Rancangan Perda dan Perwako”. Melalui peran tersebut, Forum RT/RW bertindak sebagai penghubung aspirasi warga di tingkat RT/RW sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban serta penyaluran masukan terhadap kebijakan lokal.

Laiknya Forum RT/RW, tugas dan fungsi LPM juga ditetapkan secara spesifik dalam regulasi daerah. Pasal 4 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2005 mengunci bahwa LPM Kelurahan (LPMK) bertugas: “menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah; menggerakkan dan mengoordinasikan untuk masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk memantau pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat”. Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, LPM berfungsi antara lain sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta media komunikasi dan informasi antara pemerintah kelurahan dengan warga. Dengan kata lain, LPM menjadi ujung tombak dalam menampung aspirasi serta menggerakkan swadaya masyarakat di tingkat kelurahan guna mendukung keberhasilan program pembangunan secara partisipatif.

Secara garis besar, Forum RT/RW dan LPM memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi di lingkungan masyarakat. Forum RT/RW berfokus pada koordinasi antar pengurus RT/RW dan komunikasi dengan pemerintah, guna menunjang kelancaran tugas-tugas RT/RW sebagai mitra pemerintah. Sementara itu, LPM lebih berperan dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan partisipatif, yakni menampung aspirasi serta mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan kelurahan. Pembagian peran yang jelas berdasarkan dasar hukum kelurahan.bpk.go.id. Pembagian peran yang jelas berdasarkan dasar hukum suatu masalah.



masing-masing ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau

1. Dilarang menulis di luar undang-undang
sehingga Forum RT/RW dan LPM dapat menjalankan fungsinya secara
optimal sesuai kewenangannya.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Pandangan Islam tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam perspektif Islam memiliki landasan utama pada ajaran Alquran dan Hadist yang menjadi panduan hidup bagi umat manusia dalam berbagai kehidupan, termasuk agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, dan kesehatan. Ajaran ini berfungsi sebagai petunjuk untuk mencapai kemajuan kebangsaan yang wajar melalui upaya kognitif dan kultural.

Alquran, sebagai sumber utama ajaran Islam, dapat dianggap sebagai kebijakan ilahi yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Alquran berisi arahan dan petunjuk bagi umat Islam untuk hidup yang jelas, memberikan arahan dan petunjuk bagi umat Islam untuk menuju kehidupan yang benar dan lurus sesuai dengan kehendak Allah.

Kebijakan publik dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Para cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi menekankan pentingnya pemenuhan maqashid shari'ah dalam kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah atau ulil amri.

Dalam QS. An-Nahl ayat 125, Allah berfirman :

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ

رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang

baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya

batulan suatu masalah.



Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

Allah menyerukan agar umat Islam mengajak orang lain kepada jalan-Nya bijaksana dan penuh kebaikan. Ayat ini mengandung prinsip bahwa kebijakan hendaknya dilakukan dengan hikmah dan cara yang baik agar kebijakan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam QS. Huud ayat 6, Allah berfirman :

مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَرًا هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِيْكِبِ مِنْهُ

Artinya : Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).

Pada ayat tersebut konsep kebijakan dalam Islam juga tercermin bahwa kebahagiaan tidak hanya ditujukan bagi manusia, tetapi juga bagi semua makhluk kehidupan-Nya. Kebijakan publik yang Islami harus mencakup kesejahteraan spiritual, sosial, dan lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat.

Terdapat enam prinsip utama yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan publik menurut perspektif Islam:

Ketuhanan (Ilahiah): Setiap kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan mengutamakan ketaatan kepada Allah.

Kemanusiaan (Insaniah): Kebijakan harus bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik untuk masa kini maupun masa mendatang.

1. Dilarang mengambil sebagiarpapuan atau seluruh Banya
- a. Pengutipannya pentuk
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kesepakatan dan kesetujuan penulis:
1. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, pengembangan, dan penyebarluasan pengetahuan.
2. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
3. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan.
4. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
5. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
6. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.

- Kesepakatan dan kesetujuan penulis:
1. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, pengembangan, dan penyebarluasan pengetahuan.
2. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
3. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
4. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
5. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
6. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.

- Kesepakatan dan kesetujuan penulis:
1. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, pengembangan, dan penyebarluasan pengetahuan.
2. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
3. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
4. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
5. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
6. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.

- Kesepakatan dan kesetujuan penulis:
1. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, pengembangan, dan penyebarluasan pengetahuan.
2. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
3. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
4. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
5. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
6. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.

- Kesepakatan dan kesetujuan penulis:
1. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, pengembangan, dan penyebarluasan pengetahuan.
2. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
3. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
4. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
5. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.
6. Karya tulis ini merupakan hasil kerjasama antara penulis dan institusi.



c. Keseimbangan (Tawazun): Kebijakan publik harus memperhatikan keseimbangan

1. Antara berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun material.

2. Adil (Al-'Adalah): Kebijakan harus dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta ketuhanan.

3. Pelayanan (Al-Khadimah): Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus menastikan kebijakan publik berfokus pada pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

4. Keteladanan (Usrah Al-Hasanah): Pemimpin sebagai pembuat kebijakan harus menjadikan teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan sikap amanah dan adil.

QS. Al-Isra ayat 53, Allah berfirman :

وَقُلْ لِعِبَادِيْ يَقُولُوا أَتَّيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ بَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلنَّاسَ عَدُوًّا مُّبِينًا

Aritinya : Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Ayat tersebut mengingatkan agar manusia selalu berkata baik dan menghindari pertikaian, karena setan berusaha menciptakan perpecahan di antara manusia. Ayat ini juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik agar dilakukan dengan cara yang baik, jelas, dan santun agar mudah diterima oleh masyarakat.



2.10.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Nisa Utami, Wayan Suadnya, dan Ida Ayu Sutarini (2024) berjudul “Kommunikasi Partisipatif pada Organisasi Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak” menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana Forum Anak berperan dalam menyuarakan hak-hak anak di Aceh Timur. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip komunikasi partisipatif, seperti *dialog*, *voice*, dan *action-reflection-action*, dalam menyukseskan implementasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak. Forum Anak terbukti menjadi ruang efektif untuk aspirasi dan pelibatan masyarakat, khususnya anak-anak, dalam perencanaan kebijakan.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus substansi dan pendekatan. Penelitian Nisa menekankan pentingnya proses komunikasi partisipatif dalam forum anak sebagai pelaksana kebijakan perlindungan anak. Sementara penelitian ini menyoroti faktor-faktor penghambat implementasi program di forum RT/RW dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn, yang mencakup variabel sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan karakteristik pelaksana.

Penelitian Nur Qalbi Talib, Sri Rahayu Suparman, dan Putri Pratiwi (2024) berjudul “Implementasi Kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Pangkep” bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan Kabupaten/Kota Sehat dijalankan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan terganggu karena keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan komunikasi yang tidak efektif di tingkat kecamatan dan desa. Model implementasi kebijakan

1. Dilarang mengungkapkan kebijakan Kabupaten Layak Anak” menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana Forum Anak berperan dalam menyuarakan hak-hak anak di Aceh Timur.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang digunakan mengacu pada prinsip komunikasi vertikal-horizontal dan efektivitas sumber daya pelaksana.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada konteks dan struktur organisasi yang diteliti. Penelitian Nur Qalbi fokus pada forum lintas sektor dalam sistem kesehatan kabupaten, sedangkan penelitian ini menelaah forum RT/RW sebagai bagian dari sistem sosial kemasyarakatan lokal. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi hambatan seperti koordinasi yang lemah, partisipasi rendah, dan ketimpangan distribusi sumber daya yang dalam penelitian ini dianalisis lebih sistematis menggunakan model Van Meter dan Van Horn.

Penelitian Indah Sari, A. Hardoko, dan Edi Rachmad (2024) berjudul “Implementasi Paguyuban dan Nilai Paguyuban pada Forum Komunikasi Dayak Lundayeh di Desa Singai Trang, Kalimantan Utara” menggambarkan keberhasilan forum komunikasi dalam membentuk solidaritas sosial dan nilai kekeluargaan. Forum ini menekankan penguatan relasi sosial berbasis adat dan nilai gotong royong dalam komunitas Dayak Lundayeh. Hasilnya menunjukkan efektivitas forum dalam menjaga kohesi sosial dan menjawab kebutuhan lokal.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada titik berat pembahasan. Penelitian Indah Sari menyoroti nilai-nilai budaya sebagai kekuatan utama dalam keberhasilan forum komunikasi. Sementara penelitian ini lebih menelaah forum RT/RW sebagai bagian dari sistem pemerintahan formal yang menghadapi hambatan struktural dan administratif dalam implementasi program. Penelitian ini menekankan pada ketidakefisienan birokrasi dan keterbatasan pelatihan yang dianalisis melalui variabel implementasi kebijakan.



2.11. Defenisi Konsep

2.

Forum Komunikasi RT/RW merupakan wadah koordinasi dan konsultasi yang menghubungkan ketua RT dan RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penerapan undang-undang mengingat sebagian besar masyarakat dilindungi oleh undang-undang. Saat ini, forum komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat serta berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam praktiknya, forum ini memiliki beberapa karakteristik penting: pertama, sebagai media koordinasi dalam pembangunan di tingkat RT/RW; kedua, sebagai wadah aspirasi masyarakat; ketiga, sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif. Hidayat (2020) menambahkan bahwa forum komunikasi RT/RW juga berperan sebagai katalisator dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat, terutama dalam implementasi program-program pembangunan di tingkat RT/RW.

Analisis Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program

Analisis faktor-faktor penghambat implementasi program merupakan proses kajian sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi elemen yang menghambat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami proses implementasi kebijakan secara sistematis. Model ini menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi dipengaruhi oleh interaksi dari enam variabel utama: (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber



Daya, (3) Komunikasi Antar Badan Pelaksana, (4) Karakteristik Badan Pelaksana (5)

2. Dilarang mengambil sebagian atau seluruh karya tulis inggris tanpa mencantumkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk penilaian dan penyelesaian tesis atau skripsi.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan model Van Meter dan Van Horn dalam penelitian ini membantu mengungkap secara sistematis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani.

Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk peningkatan efektivitas program dan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih optimal di tingkat lokal.

Kecamatan Tuah Madani

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota, yang dipimpin oleh camat. Dalam konteks penelitian ini,

Kecamatan Tuah Madani menjadi lokus penelitian untuk menganalisis efektivitas forum komunikasi RT/RW. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Suryanto

(2021) menjelaskan bahwa kecamatan memiliki peran strategis dalam: (1) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, (2) Pelayanan publik, (3) Pemberdayaan masyarakat



kelurahan/desa, dan (4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam forum komunikasi RT/RW, kecamatan berperan sebagai fasilitator dan pembina dalam mengoptimalkan fungsi forum tersebut.

2.12 Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|---|---|---|
| Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Forum Komunikasi RT/RW Di Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn (Tachjian, 2006) | 1. Standar dan Sasaran Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> a. Kejelasan program yang harus dilaksanakan (misal: <i>Cyber Education</i>, Pelatihan Administrasi RT/RW) b. Pemahaman ketua RT/RW terhadap tujuan forum komunikasi c. Kesesuaian antara tujuan program dan kebutuhan masyarakat |
| | 2. Sumber Daya | <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dana dan fasilitas b. Kompetensi SDM (pengurus RT/RW) c. Ketersediaan pelatihan atau bimbingan teknis |
| | 3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Intensitas rapat koordinasi antara forum dengan kelurahan/kecamatan b. Alur informasi antara RT/RW, forum, dan pemerintah c. Kendala dalam penyampaian informasi dan instruksi |
| | 4. Karakteristik Badan Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur organisasi forum yang jelas b. Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota forum c. Profesionalisme dan komitmen pengurus forum |
| | 5. Lingkungan : Sosial, Ekonomi dan Politik | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan forum b. Dukungan tokoh masyarakat dan lembaga |

suatu masalah.



| | | |
|----------------------|--|---|
| | local | c. Pengaruh dinamika politik lokal terhadap keberlangsungan forum |
| 6. Sikap Pelaksanaan | a. Komitmen pengurus forum dalam menjalankan program b. Tanggapan pengurus terhadap kebijakan pemerintah c. Kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat | |

13. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Pelaksanaan fungsi forum komunikasi RT & RW di Kecamatan Tuah Madani.

Analisis Pelaksanaan Fungsi Forum Komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani

Teori Model Implementasi Van Meter dan Van Horn
(Tachjan, 2006)

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana
4. Karakteristik Badan Pelaksana
5. Lingkungan : Sosial, Ekonomi dan Politik
6. Sikap Pelaksanaan

Maksimal
Cukup Maksimal
Kurang Maksimal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan data kualitatif, yaitu yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau sebenarnya terjadi tentang analisa pelaksanaan fungsi forum komunikasi RT RW Kecamatan Tuah Madani. Pemilihan metode ini karena deskriptif dimaksud untuk mengetahui secara cermat terhadap fenomena yang terjadi.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi tepat (Sedarmayanti, 2002:3). Sedangkan menurut Effendy (2010: 17) metode kualitatif memberikan pengertian bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman, atau pemikiran dan persepsi atau tangapan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilakukan di forum komunikasi RT & RW di Kecamatan Tuah Madani Sedangkan waktu pelaksanaan dari penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini di seminarkan.

3.3 Informan dan Key Informan penelitian

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Swandi (2008:86) Informan atau narasumber adalah orang yang dijadikan untuk tinjauan suatu masalah.



memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian sedangkan (Nazir, 2005:55) informan penelitian adalah subyek yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan informasi, untuk key informan dalam penelitian ini yaitu lurah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yang merupakan informan penelitian utama (*Key Informant*) adalah

Tabel 3.3-1 Jumlah Informan dalam Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Keterangan Tambahan |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | Sarjono, SE., M.M | Ketua LPM Kelurahan Sidomulyo Barat | Berusia 53 Tahun |
| 2. | Baharuddin | Ketua LPM Forum RT RW kelurahan Sidomulyo Barat | Dilantik oleh Lurah Edy Fachri pada 5 Februari 2023 (periode 2023–2026) berusia 65 Tahun |
| 3. | H. Akuan Mukerin | Ketua Forum RT RW kelurahan tuah karya | - |
| 4. | Tengku Ruzen, SE | KASI TRANTIP (perwakilan kecamatan) | - |
| 5. | Effendi M.pd | Tokoh Masyarakat | Berusia 65 Tahun |
| 6. | Eddrisson | Ketua LPS Forum RT RW kelurahan Sidomulyo Barat | Berusia 53 Tahun |

(Sumber: Penulis, 2025)

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini

adalah teknik pengambilan sampel yang wajar dan mempertimbangkan kepentingan yang wajar. UIN Suska Riau.



menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik

1. Dambil informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau pengalaman tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representative (Erihasyah & Dede, 2022).
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan data primer yaitu data yang penulis dapatkan dari responden di Kelurahan Tuah Madani.
- b. Pengumpulan data sekunder digunakan sebagai sumber informasi tambahan yang melengkapi data primer. Sumber data sekunder yang dimanfaatkan meliputi dokumentasi kegiatan forum, arsip dari pihak kecamatan, buku-buku atau literatur terkait, serta

data sekunder bertujuan memberikan landasan teoretis dan konteks faktual bagi penelitian, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif serta temuan dari data sekunder dapat diverifikasi atau dilengkapi. Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,” di mana sifatnya mendukung keperluan data primer, misalnya berupa buku, literatur, atau dokumen terkait.

Penelitian ini didukung oleh berbagai data sekunder yang memperkuat analisis mengenai implementasi program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani. Secara hukum, forum ini berlandaskan pada aturan-aturan daerah yang menutupi masalah.



relevan. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang pembentukan

1. Komunikasi RT/RW di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota menjadi dasar utama pembentukan forum tersebut (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2016).
2. Dilarang mengelompokkan pengurus RT/RW di tingkat lokal, seperti pelayanan publik, sosial, dan Regulasi ini menetapkan peran forum sebagai wahana koordinasi untuk membantu pemerintahan di tingkat lokal, seperti pelayanan publik, sosial, dan pembangunan masyarakat.

Di samping itu, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 mengatur mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan. Dengan adanya Perda ini, kedudukan LPM sebagai mitra pemerintah di bidang pembangunan diperjelas, sehingga forum RT/RW dan LPM masing-masing memiliki regulasi hukum tersendiri yang saling melengkapi fungsinya. Selain dua regulasi di atas terdapat pula ketentuan lain yang mendukung konteks operasional forum, misalnya Perwako Pekanbaru No. 152 Tahun 2017 yang mendorong peningkatan kapasitas digital pengurus RT/RW (mensyaratkan ketua RT/RW mampu mengoperasikan smartphone). Ketentuan ini menjadi acuan dalam program peningkatan kompetensi pengurus forum di era digital.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis utama. Model Van Meter dan Van Horn (1975, dikutip dalam Tachjan, 2006) menguraikan enam variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial-ekonomi-politik, dan sikap atau disposisi pelaksana. Penggunaan teori ini membantu peneliti mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.



faktor penghambat dalam pelaksanaan program Forum Komunikasi RT/RW. Melalui

1. Hak Cipta. Misalnya, dapat dianalisis apakah hambatan muncul akibat komunikasi model yang tidak efektif antara pengurus forum dan pihak kecamatan, keterbatasan sumber daya dan dukungan, karakteristik organisasi forum, maupun pengaruh kondisi lingkungan dan partisipasi masyarakat setempat.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka teori Van Meter dan Van Horn tersebut memberikan landasan konseptual yang kokoh, sehingga peneliti dapat mengevaluasi implementasi program kebijakan komprehensif dan terarah sesuai variabel-variabel implementasi kebijakan yang telah teruji di literatur.

Selain landasan hukum dan teori, data sekunder empiris berupa dokumentasi resmi daerah dan informasi statistik juga dimanfaatkan untuk menunjang penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumen forum dan kelurahan/kecamatan yang relevan, antara lain: Surat Keputusan (SK) Lurah mengenai pembentukan dan susunan pengurus Forum Komunikasi RT/RW di Tuah Madani, struktur organisasi forum, peraturan, serta berbagai dokumentasi kegiatan forum. Contoh dokumen yang digunakan adalah SK penetapan Ketua Forum RT/RW beserta lampiran struktur kepengurusan forum, dokumentasi program kerja forum di lapangan, hingga laporan atau notula hasil pertemuan rutin RT/RW. Penelitian ini juga merujuk pada proposal program yang berkaitan dengan kegiatan forum sebagai bahan data sekunder.

Sebagai contoh, proposal program “Cyber Education untuk Forum RT/RW Kelurahan Tuah Madani” (2023) digunakan untuk melihat rencana peningkatan literasi digital bagi para ketua RT/RW program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik. Di samping itu, dokumentasi literasi digital bagi para ketua RT/RW program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik. Di samping itu, dokumentasi

kegiatan seperti foto dan laporan program Bank Sampah yang dikelola forum. 1. Diharapkan peran forum dalam program kebersihan lingkungan) dan arsip laporan kelurahan ikut dijadikan referensi. Kehadiran dokumen-dokumen resmi dan arsip lokasi berperan memberikan bukti empiris tentang pelaksanaan program forum, internal forum, serta kendala operasional yang dihadapi di tingkat kelurahan. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menelaah dokumen tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana dibentuk, program apa saja yang telah direncanakan atau dilaksanakan, serta mana keterlibatan dan dukungan pemerintah setempat dalam forum, sehingga analisis faktor penghambat dapat didasarkan pada fakta-fakta di lapangan.

Terakhir, data statistik dan laporan instansi resmi dimanfaatkan untuk menggambarkan kondisi demografis dan administratif wilayah studi sebagai konteks penting penelitian. Sumber data ini mencakup publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas terkait di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan Pekanbaru dalam Angka 2022 (terbitan BPS Kota Pekanbaru) yang berisi data luas wilayah, jumlah penduduk, serta kondisi sosial-ekonomi Kota Pekanbaru terkini. Dari data BPS tersebut diketahui, misalnya, bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2023 mencapai sekitar 1,14 juta jiwa dengan rata-rata kepadatan ± 1.810 jiwa/km², dan Kecamatan Tuah Madani sendiri memiliki kepadatan penduduk relatif lebih rendah karena merupakan wilayah pemekaran baru.

Selain itu, publikasi BPS dan sumber lokal menyediakan angka jumlah RT dan RW di Kecamatan Tuah Madani pada tahun 2022 terdapat 97 RW dan 439 RT (total 536 ketua RT/RW) yang tergabung dalam forum ini (Badan Pusat Statistik Kota



Pekanbaru, 2022). Angka tersebut penting untuk menunjukkan skala forum dan

1. **[My Cipta Jiilidukcapil Untang-Jundang]** jaringan yang harus dikoordinasikan dalam implementasi program. Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Disdukcapil) tahun 2022 juga digunakan, misalnya mencatat total penduduk sekitar 1,107 juta jiwa pada tahun tersebut (Disdukcapil Kota Pekanbaru, 2022) dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Informasi dari Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru (2022) turut melengkapi gambaran administrasi kependudukan, seperti rata-rata jumlah penduduk yang pindah datang (masuk) dan pergi (keluar) setiap bulannya.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan data statistik dan laporan resmi ini berperan memberikan konteks

mengenai karakteristik wilayah Tuah Madani dan Kota Pekanbaru secara umum mulai dari besaran populasi, kepadatan, hingga struktur pemerintahan lokal.

Data sekunder kuantitatif tersebut membantu peneliti memahami tantangan implementasi, misalnya besarnya populasi yang harus dilayani forum, dinamika kependudukan, dan kebutuhan layanan di kecamatan baru. Dengan demikian, gabungan seluruh data sekunder landasan hukum, teori model implementasi, dokumen forum resmi, serta data statistik dari instansi terpercaya saling melengkapi dalam menunjang penelitian ini.

Masing-masing komponen data tersebut memainkan perannya: regulasi memberikan kerangka normatif, teori menyediakan kerangka analitis, dokumen lokal menghadirkan bukti empiris lapangan, dan statistik menawarkan konteks makro wilayah. Hal ini memungkinkan analisis faktor-faktor penghambat implementasi suatu masalah.



program Forum Komunikasi RT/RW di Tuah Madani dilakukan secara lebih mendalam, terukur, dan terpadu berdasarkan sumber informasi yang komprehensif.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Memperbaikinya undang-undang ini akan memberi pengaruh yang wajar bagi UIN Suska Riau. Kegiatan observasi ini dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengajukan pertanyaan dan menjawabnya berdasarkan hasil survei yang dilakukan di seluruh kota dan kabupaten di provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pendidikan di provinsi Riau dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan antara pengembangan pendidikan di provinsi Riau dengan pengembangan pendidikan di provinsi lain di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup analisis tentang pengembangan pendidikan di provinsi Riau dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan antara pengembangan pendidikan di provinsi Riau dengan pengembangan pendidikan di provinsi lain di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup analisis tentang pengembangan pendidikan di provinsi Riau dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah.

1. Belaksanaan Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilaksanakan oleh peneliti sebagai bagian dari metode pengumpulan data kualitatif. Peneliti terjun langsung ke Kecamatan Tuah Madani untuk mengamati implementasi program Forum Komunikasi RT/RW serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Kegiatan observasi dilakukan selama penelitian berlangsung (sekitar Mei–Juli 2025) dengan mengunjungi lokasi-lokasi terkait forum, mencatat kondisi di lapangan, serta merekam aktivitas forum baik melalui catatan tertulis maupun dokumentasi foto. Seluruh pengamatan dilakukan secara langsung (first-hand) dan terstruktur sesuai fokus penelitian, sehingga data observasi yang diperoleh dapat memperkuat temuan hasil wawancara dan dokumentasi resmi.



2) Observasi Kegiatan Rapat dan Partisipasi Forum

Salah satu fokus observasi adalah kegiatan rapat koordinasi Forum Komunikasi RT/RW. Peneliti menghadiri pertemuan forum tingkat kecamatan yang diselenggarakan di aula Kantor Camat Tuah Madani (Gambar 5.15). Rapat tersebut dihadiri oleh para Ketua Forum RT/RW dari setiap kelurahan se-Kecamatan Tuah Madani serta perwakilan kecamatan. Peneliti mengamati bahwa rapat forum dilaksanakan secara insidental (tidak terjadwal rutin setiap bulan) dan hanya diadakan ketika dianggap perlu oleh pihak kecamatan. Keteraturan dan frekuensi rapat yang ini menunjukkan belum optimalnya fungsi forum sebagai wadah komunikasi yang terstruktur. Dalam rapat yang diamati, misalnya, peneliti mencatat bahwa pertemuan lebih banyak bersifat administratif dan koordinatif terbatas, tanpa pembahasan program kerja strategis yang mendalam.

Tingkat partisipasi pengurus forum yang hadir juga diamati melalui daftar rapat (Gambar 5.16). Dari daftar hadir tersebut tampak bahwa hanya sebagian pengurus yang aktif hadir sejalan dengan temuan penelitian bahwa sekitar 30–50% *sebagian anggota forum yang berpartisipasi aktif* dalam kegiatan. Banyak *Ketua RT/RW atau pengurus lainnya tidak hadir* dalam rapat, menandakan rendahnya partisipasi dan minimnya komitmen sebagian anggota forum. Kondisi ini mengindikasikan hambatan dalam implementasi program forum, karena kurangnya keterlibatan anggota akian mengurangi efektivitas penyampaian aspirasi dan koordinasi program di tingkat akar rumput. Observasi juga menunjukkan bahwa tidak ada jadwal rapat tetap yang diumumkan jauh hari; rapat dilakukan “*sesuai kebutuhan*”. Hal ini membuat akian jauh hari; rapat dilakukan “*sesuai kebutuhan*”. Hal ini membuat akian suatu masalah.



kontinuitas komunikasi forum terganggu dan tindak lanjut program menjadi tidak

- Halaman**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa izin dan pengakuan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penerjemahan, dan kerja ilmiah, Riset dan laporan sekretariat Barat dan sekitarnya.

Wasi Sarana Prasarana dan Sekretariat Forum

Peneliti juga mengamati ketersediaan sarana prasarana yang mendukung operasional forum. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Forum Komunikasi RT/RW tidak memiliki kantor atau sekretariat khusus di kecamatan maupun di beberapa kelurahan. Sebagai contoh, di Kelurahan Tuah Karya forum manfaatkan sebuah bangunan Bank Sampah sebagai sekretariat sementara (Gambar 5.12). Peneliti mendatangi lokasi sekretariat tersebut yang terletak di RW 2 Kelurahan Tuah Karya, dan menemukan bahwa tempat itu berfungsi ganda: selain sebagai bank sampah (tempat pengelolaan sampah daur ulang oleh warga), juga dipakai sebagai kantor forum. Tidak tersedianya ruang kantor yang layak memaksa forum menggunakan fasilitas seadanya, seperti ruang tamu rumah pengurus atau balai warga, untuk menjalankan kegiatan administrasi. Kondisi ini menjadi hambatan implementasi program, karena tanpa sekretariat tetap forum kesulitan menyimpan dokumen, mengelola administrasi, dan berkoordinasi secara rutin.

Situasi serupa diamati di Kelurahan Sidomulyo Barat, di mana forum menumpang di kantor LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) setempat sebagai sekretariat (Gambar 5.14). Peneliti berkunjung ke kantor LPM Kelurahan Sidomulyo Barat dan melihat ruangan sekretariat bersama tersebut. Fasilitas ruang rapat atau sekretariat yang digunakan bersifat bersama (multi-fungsi) dengan kegiatan lain, sehingga forum hanya dapat menggunakan ruangan pada jadwal tertentu dan tidak memiliki kendali penuh atas fasilitas. Hal ini membatasi aktivitas forum, misalnya

sulit mengadakan rapat mendadak atau menyimpan arsip forum secara terorganisir di itu. Secara umum, hasil observasi fasilitas di berbagai kelurahan memperlihatkan minimnya dukungan sarana prasarana bagi forum: tidak ada kantor resmi forum nyaris tidak terlihat. Ketiadaan dukungan fasilitas fisik ini menunjukkan rendahnya komitmen institusional dari pemerintah lokal terhadap forum RT/RW, sehingga implementasi program forum sangat terbatas oleh kondisi lapangan serba kekurangan.

Observasi Media Komunikasi Forum

Selain sarana fisik, peneliti mengamati bagaimana forum RT/RW menjalankan komunikasi internal dan dokumentasi kegiatannya. Berdasarkan pengamatan, forum banyak mengandalkan media komunikasi informal seperti grup WhatsApp untuk koordinasi antar pengurus. Peneliti diberi akses untuk melihat Grup Ketua Forum se-Kecamatan Tuah Madani (Gambar 5.13), yang berisi para ketua forum RT/RW dari setiap kelurahan dan perwakilan kecamatan. Tampak bahwa grup percakapan tersebut digunakan untuk berbagi informasi singkat, undangan rapat, dan dokumentasi foto kegiatan forum. Misalnya, pengumuman rapat dan hasil keputusan sering kali hanya disebarluaskan melalui pesan WhatsApp, tanpa dilengkapi surat resmi atau notulen tertulis. Pemanfaatan media sosial ini terpaksa dilakukan karena kurangnya dukungan alat komunikasi formal (seperti tidak adanya website forum, buletin, atau sistem informasi resmi). Observasi peneliti mencatat bahwa dokumentasi kegiatan forum seperti fotorapat, daftar hadir, atau notulen sebagian besar diunggah dan disimpan secara digital informal di grup tersebut.



Mengandalkan *WhatsApp* sebagai sarana koordinasi memang praktis dan mudah namun peneliti menilai hal ini juga merupakan indikator kendala pelaksanaan program. Tidak adanya platform komunikasi resmi menandakan bahwa forum berjalan dengan infrastruktur komunikasi minimal. Akibatnya, arsip dan kontinuitas berjalan tidak terjamin data di grup rentan terlewat atau hilang dalam percakapan. Selain itu, komunikasi berbasis media sosial cenderung tidak terstruktur dan tergantung pada siapa yang aktif di grup. Observasi ini sejalan dengan temuan bahwa harus mandiri dalam dokumentasi dan minim pendampingan teknis dari pemerintah. Dengan demikian, hambatan dalam komunikasi antar badan pelaksana menjadi nyata: tanpa dukungan sistem komunikasi yang baik, penyebaran informasi dan koordinasi kegiatan forum tidak optimal.

Observasi Dokumen Resmi dan Struktur Organisasi Forum

Sebagai bagian dari observasi, peneliti juga meninjau dokumen-dokumen forum dan struktur kelembagaan yang ada. Di Kantor Kelurahan Tuah Karya, peneliti memeriksa keberadaan Surat Keputusan (SK) penunjukan Ketua Forum RW/RW. Hasil pengamatan mengonfirmasi bahwa SK Ketua Forum Kelurahan Tuah Karya memang diterbitkan oleh pihak Kecamatan Tuah Madani (Gambar 5.17). Dokumen SK tersebut memuat pengesahan susunan pengurus forum tingkat kelurahan, termasuk Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi bidang. Adanya SK resmi ini memberikan legalitas terhadap pembentukan forum, menandakan bahwa secara administratif forum telah diakui oleh pemerintah setempat. Peneliti mendokumentasikan SK ini sebagai bukti bahwa forum memiliki landasan hukum operasional di setiap kelurahan. Namun, observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa



meski secara dokumen struktur organisasi forum sudah dibentuk, penerapannya di

1. Meski secara dokumen struktur organisasi forum sudah dibentuk, penerapannya di lapangan belum berjalan efektif. Hal ini tampak dari wawancara dan pengamatan keterlibatan pengurus forum: banyak pengurus tidak melaksanakan tugas sesuai peran yang diberikan.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis informal untuk kepentingan yang wajar.

Peneliti juga mengamati struktur organisasi forum yang dipajang di kelurahan Tuah Karya misalnya, ditampilkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan posisi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang (seperti Seksi Sosial, Ekonomi, Keamanan, dll.). Observasi langsung terhadap bagan ini memperlihatkan bahwa secara ideal forum telah memiliki pembagian tugas. Akan tetapi, ketika peneliti mencocokkan dengan praktik di lapangan, terungkap bahwa pembagian tugas tersebut tidak terlaksana dengan baik. Dalam diskusi informal saat observasi, Ketua Tuah Karya mengakui bahwa partisipasi pengurus sangat rendah (hanya sekitar 30% yang aktif) dan banyak anggota tidak memahami secara jelas tugas masing-masing. Minimnya sosialisasi dan internalisasi job description menyebabkan beberapa fungsi jabatan di struktur tidak berjalan. Sebagai contoh, bendahara forum tidak aktif mengelola kas secara rutin, dan koordinator bidang tidak memiliki program kerja tetap. Peneliti mencatat tidak adanya dokumen panduan tugas atau rincian tertulis yang dibagikan kepada pengurus sebagai salah satu faktor penyebab kebingungan peran.

Dari observasi dokumen dan struktur kelembagaan ini, dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi program forum juga bersumber dari aspek kelembagaan



internal. Meskipun surat keputusan dan struktur organisasi telah ada (menunjukkan

1. Dilarang mengeluarkan pengaruh atau pelatihan khusus setelah SK dikeluarkan, sehingga struktur forum tersebut belum efektif. Peneliti melihat tidak ada mekanisme evaluasi kinerja pengurus atau pelatihan khusus setelah SK dikeluarkan, sehingga struktur forum menjadi simbolis saja. Hal ini selaras dengan hambatan yang teridentifikasi dalam penelitian: kekosongan kepemimpinan aktif, dominasi beberapa orang saja, dan adanya regenerasi atau penegasan peran membuat program-program forum sulit dilaksanakan dengan baik.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Relevansi Temuan Observasi dengan Fokus Penelitian

Seluruh temuan observasi di atas memiliki relevansi kuat terhadap fokus penelitian, yakni implementasi program Forum Komunikasi RT/RW dan faktor-faktor hambatannya di Kecamatan Tuah Madani. Pertama, aspek pelaksanaan program: observasi menunjukkan bahwa kegiatan forum yang terlaksana lebih banyak bersifat informal dan sosial (misalnya gotong royong atau pertemuan ad hoc), sementara program strategis seperti pelatihan administrasi atau literasi digital tidak terlihat dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan implementasi program belum optimal, konsisten dengan hasil analisis bahwa forum lebih berfungsi sebagai wadah seremonial ketimbang agen perubahan. Kedua, dari aspek hambatan: temuan observasi memperjelas berbagai kendala nyata, antara lain: rendahnya partisipasi pengurus (terlihat dari sepinya kehadiran rapat dan minimnya anggota aktif), ketiadaan dukungan anggaran dan fasilitas (forum tidak punya kantor, pendanaan swadaya minimal), komunikasi antar pelaksana yang lemah (hanya mengandalkan grup WhatsApp, tanpa sistem resmi), serta kelemahan struktur kelembagaan (struktur ada



tetapi tidak berjalan, SK hanya formalitas tanpa tindak lanjut). Semua faktor ini

1. Dapat secara langsung di lapangan dan memperkuat data wawancara yang diperoleh
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pak Cipto mii k UIN Suska Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Pengsetipan hanya untuk penelitian dan
Penggutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan demikian, narasi observasi ini menegaskan bahwa hambatan program forum RT/RW di Tuah Madani bukan sekadar konsep, melainkan fakta empiris yang dapat dilihat dan dicatat secara langsung. Proses observasi memberikan konteks konkret: misalnya bagaimana forum berjalan tanpa fasilitas memadai, bagaimana rapat berlangsung tanpa jadwal baku dan dengan kehadiran yang terbatas, serta bagaimana pengurus forum bekerja tanpa peran yang jelas. Semua pengamatan ini sejalan dengan kerangka analisis Van Meter dan Van Horn yang digunakan, di mana variabel sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, dan lingkungan berkontribusi terhadap kinerja implementasi program. Hasil observasi lapangan alihnya melengkapi bukti bahwa Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani belum berfungsi optimal, dan berbagai kendala yang teridentifikasi perlu ditatasi agar forum dapat menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang berkaitan dalam penelitian. Menurut Cresswell (2012: 254) di dalam suatu penelitian dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan subjek yang sudah ditentukan, mewawancarai dengan cara ditelepon, atau dalam



focus group interview (wawancara kelompok tertentu terdiri dari enam sampai dengan

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta diilindungi Undang-Undang dalam rangka Dokumentasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam rangka penelitian, pengembangan, pengajaran, atau pengutipan hanya untuk keperluan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang implementasi Program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data lapangan terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara sistematis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu deduktif, induktif, dan deskriptif. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi Program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani.

Deduktif

Deduktif adalah metode berpikir di mana kita mulai dengan konsep umum atau prinsip lalu menerapkannya pada situasi khusus untuk menarik kesimpulan. Ini melibatkan menghubungkan hal-hal spesifik dengan prinsip-prinsip yang lebih umum. Dengan kata lain, deduktif adalah proses mencapai kesimpulan yang spesifik dari premis yang lebih umum.

Pendekatan deduktif digunakan dengan mendasarkan analisis pada teori dan konsep umum yang relevan. Misalnya, penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka konseptual dalam memahami proses pelaksanaan program. Melalui teknik deduktif, peneliti menelaah



data empiris dengan berpedoman pada konsep teori tersebut, sehingga peneliti dapat

1. Mengidentifikasi sejauh mana fenomena di lapangan sesuai atau menyimpang dari kerangka teoritis. Dengan kata lain, analisis dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan abstrak (teori atau model konseptual) untuk kemudian menjelaskan temuan khusus terkait pelaksanaan Forum Komunikasi RT/RW di Tuah Madani.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hari Cipta Krida Induksi Untang-Ju dang
dan Abstrak**

Induktif

© Halakipatamik UIN Suska Riau

Induktif adalah pendekatan berpikir di mana kita menggunakan contoh atau kejadian khusus untuk mengembangkan teori, hukum, atau konsep yang lebih umum. Pendekatan ini dimulai dengan observasi atau data spesifik, dan dari situ, kita menarik kesimpulan atau membuat generalisasi yang lebih luas. Dengan kata lain, induktif melibatkan membuat pernyataan yang umum berdasarkan pengamatan atau data yang spesifik.

Pendekatan induktif diterapkan untuk menarik kesimpulan dari pola-pola khusus yang ditemukan di lapangan. Berbagai informasi dan fakta empiris yang diperoleh misalnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, ketua forum RT/RW, dan pihak kecamatan, serta temuan observasi langsung diolah secara induktif. Dari rincian temuan tersebut, peneliti mengidentifikasi tema atau pola yang berulang, seperti jenis kendala yang paling sering muncul atau kesamaan tanggapan para narasumber. Melalui analisis induktif ini, disusun generalisasi atau kesimpulan yang lebih umum mengenai faktor-faktor penghambat implementasi program. Artinya, peneliti bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus (temuan empiris di lapangan) menuju pemahaman yang bersifat umum atas permasalahan penelitian.



c. Deskriptif

- Pendekatan studi deskriptif bertujuan untuk memenuhi semua fitur atau terkait dari data yang diamati dengan menggambarkan, mengilustrasikan, atau meringkasnya untuk membantu menemukan pola atau tren apa pun yang mungkin

Pendekatan deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan situasi penelitian sistematis, faktual, dan akurat. Peneliti mendeskripsikan kondisi nyata program Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani berdasarkan data yang terkumpul. Sebagai contoh, dijelaskan secara terperinci tingkat keaktifan forum yang rendah, minimnya partisipasi warga dalam kegiatan, adanya kendala anggaran dan keterbatasan sumber daya, serta berbagai hambatan lain yang identifikasi selama penelitian. Semua aspek tersebut disajikan apa adanya sesuai lapangan. Melalui teknik deskriptif ini, penelitian memberikan gambaran faktif mengenai fenomena yang diteliti guna memudahkan identifikasi pola atau yang relevan dengan faktor-faktor penghambat implementasi program.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- 4.4. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**
- Lokak Geografis dan Administratif**
- Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang terletak di bagian Pulau Sumatera. Secara geografis, Kota Pekanbaru berada pada koordinat $0^{\circ}32' - 0^{\circ}43'$ Lintang Utara dan $101^{\circ}26' - 101^{\circ}34'$ Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sangat strategis karena berada pada jalur tengah Sumatera yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia, serta menjadi penghubung antara Provinsi Riau dengan provinsi-provinsi tetangganya seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jambi.

Secara administratif, Kota Pekanbaru terdiri atas 15 kecamatan dan 83 kelurahan (setelah pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016). Luas wilayah Kota Pekanbaru mencapai sekitar $632,26 \text{ km}^2$. Dengan perkembangan pesat di bidang infrastruktur, transportasi, ekonomi, dan pendidikan, Pekanbaru menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Riau dan salah satu kota dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Pulau Sumatera.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Pelalawan,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.



Pekanbaru memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan di wilayah Sumatera tengah. Perkembangan kota ini terus mengalir oleh adanya investasi daerah, pertumbuhan penduduk, serta modernisasi dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Table 4.1-1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Pekanbaru Tahun 2024

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Keterangan Tambahan |
|----|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | Rumbai | 5 | Wilayah utara dekat sungai siak |
| 2 | Rumbai Barat | 6 | Pemekaran dari Rumbai |
| 3 | Rumbai Timur | 5 | Wilayah Industri dan Pelabuhan |
| 4 | Lima Puluh | 5 | Pusat pemerintahan Kota |
| 5 | Sail | 5 | Kawasan padat penduduk |
| 6 | Kota Pekanbaru | 4 | Sentra ekonomi dan jasa |
| 7 | Sukajadi | 4 | Kawasan perdagangan |
| 8 | Santerelan | 4 | Wilayah bersejarah kota |
| 9 | Payung Sekaki | 6 | Kawasan logistik dan pergudangan |
| 10 | Marpoyan | 6 | Pusat pendidikan dan pemukiman |
| 11 | Bukit Raya | 6 | Akses utama ke Bandara SSQ II |
| 12 | Tenayan Raya | 7 | Pusat pemerintahan baru |
| 13 | Bina Widya | 5 | Kawasan universitas dan pemukiman |
| 14 | Tuah Madani | 5 | Wilayah hasil pemekaran dari Tampan |
| 15 | Kulim | 5 | Wilayah pemekaran dengan potensi UMKM |

- Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru dalam Angka 2024 dan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016.
1. Dilarang mengambil atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: © Maklumat UIN Suska Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Jasa Penyebarluasan Karya
b. Pengutipan tidak seluruhnya untuk
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru dalam Angka 2024

dan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016.

dan suatu masalah.



4.1.2.Luas Wilayah dan Kependudukan

- Hak Cipta** © **Kota Pekanbaru** memiliki luas wilayah sebesar ± 632,26 km² dan secara administratif terbagi ke dalam 15 kecamatan serta 83 kelurahan. Luas ini menjadikan Pekanbaru sebagai kota terbesar di Provinsi Riau dari segi wilayah, sekaligus menjadi kota yang penting dalam hal kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan jasa di wilayah Sumatera bagian tengah.

Sebagai kota dengan perkembangan urbanisasi yang sangat pesat, Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, jumlah penduduk pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.144.232 jiwa, yang terdiri atas 580.120 laki-laki dan 564.112 perempuan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, migrasi, serta tingginya aktivitas ekonomi yang menjadikan Pekanbaru sebagai magnet bagi penduduk dari berbagai daerah di Provinsi Riau maupun dari provinsi lain di Pulau Sumatera.

Kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru secara rata-rata adalah sekitar 1.810 jiwa/km², namun kepadatan ini tidak merata karena dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing kecamatan. Kecamatan seperti Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Marpoyan Damai memiliki kepadatan tinggi karena merupakan kawasan permukiman padat dan pusat aktivitas ekonomi. Sementara kecamatan seperti Tuah Madani dan Rimbai masih memiliki kepadatan relatif rendah karena merupakan wilayah pemekaran atau pengembangan baru.

Distribusi penduduk ini menjadi salah satu tantangan dan sekaligus peluang dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pemerintah Kota



Pekanbaru terus mendorong pengembangan infrastruktur, digitalisasi pelayanan, serta teraan sarana pendidikan dan kesehatan ke seluruh kecamatan untuk mengelobi pertumbuhan kependudukan.

Tabel 4.1-2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru per Kecamatan Tahun 2023

| Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) |
|----------------|---------------------------------|------------------|--|
| Rumbai | 89,08 | 42.351 | 475 |
| Rumbai Barat | 41,64 | 38.716 | 930 |
| Rumbai Timur | 52,30 | 47.101 | 900 |
| Lima Puluh | 5,66 | 51.223 | 9.052 |
| Sail | 5,73 | 45.318 | 7.906 |
| Kota Pekanbaru | 3,95 | 44.712 | 11.324 |
| Sukajadi | 5,18 | 56.900 | 10.983 |
| Sanepelan | 5,91 | 43.087 | 7.289 |
| Payung Sekaki | 56,15 | 72.204 | 1286 |
| Marpoyan | 31,56 | 97.124 | 3.077 |
| Bukit Raya | 23,53 | 81.700 | 3.473 |
| Tenayan Raya | 112,25 | 103.621 | 923 |
| Bina Widya | 80,36 | 60.405 | 752 |
| Tuah Madani | 70,00 | 66.900 | 956 |
| Kulim | 48,66 | 83.510 | 1.715 |
| Total | 632,26 | 1.144.232 | 1.810 |

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka 2024



4.1.3. Aspek Demografi

- Aspek demografi merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan jumlah, komposisi, dan dinamika penduduk di suatu wilayah. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau mengalami pertumbuhan demografi yang cukup tinggi dalam dua dekade terakhir. Hal ini diperkuat oleh pesatnya urbanisasi, perkembangan sektor industri dan jasa, serta migrasi dari berbagai daerah di Indonesia menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
1. Dilarang mengalih gunakan daerah, karena berkaitan langsung dengan jumlah, komposisi, dan dinamika penduduk di suatu wilayah. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau mengalami pertumbuhan demografi yang cukup tinggi dalam dua dekade terakhir. Hal ini diperkuat oleh pesatnya urbanisasi, perkembangan sektor industri dan jasa, serta migrasi dari berbagai daerah di Indonesia menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data dari Pekanbaru dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, total jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2023 mencapai 1.144.232 jiwa, yang terdiri atas 580.120 laki-laki (50,7%) dan 564.112 perempuan (49,3%). Rasio jenis kelamin menunjukkan nilai 103, yang berarti terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Hal ini menunjukkan keseimbangan gender yang cukup proporsional di tingkat kota.

Dari segi kelompok usia, penduduk Pekanbaru didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) dengan persentase lebih dari 65%, yang mencerminkan potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) tetap menjadi perhatian dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Selain itu, komposisi penduduk berdasarkan agama menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Pekanbaru menganut agama Islam, diikuti oleh pemeluk Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman ini menjadi suatu masalah.



karakteristik multikultural Kota Pekanbaru yang hidup dalam semangat toleransi dan

1. Hak kerukunan antarkelompok masyarakat.
2. Dil

Tabel 4.1-3 Komposisi Demografi Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2023

| No | Kategori | Subkategori | Jumlah (Jiwa) | Persentasi (%) |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1 Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | Laki-Laki | 580.120 | 50,7% |
| | | Perempuan | 564.112 | 49,3% |
| | Total | 1.144.232 | | 100% |
| 2 Usia | Usia | 0–14 tahun | 259.600 | 22,7% |
| | | 15–64 tahun | 754.300 | 65,9% |
| | | ≥ 65 tahun | 130.332 | 11,4% |
| | Total | 1.144.232 | | 100% |
| 3 Agama | Agama | Islam | 1.048.200 | 91,6% |
| | | Kristen (Protestan) | 45.600 | 4,0% |
| | | Katolik | 22.300 | 1,9% |
| | | Buddha | 18.200 | 1,6% |
| | | Hindu | 6.000 | 0,5% |
| | | Konghucu | 3.932 | 0,4% |
| | Total | 1.144.232 | | 100% |

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka 2024

1. **Burata** mengutip sebagian atau kerupuk.
Pengutip hanya untuk kepentingan.
2. Dilarang mengumumkan dan memerlukan.

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: ilangan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan pentingan yang wajar UIN Suska Riau.

an, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



1. Perekonomian dan Pembangunan

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Sumatera, khususnya di Provinsi Riau. Perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru ditopang oleh berbagai sektor strategis seperti perdagangan besar dan konstruksi, industri pengolahan, transportasi, jasa pendidikan, dan pemerintahan. Letaknya yang strategis di jalur lintas Sumatera menghadirkan kota ini sebagai simpul konektivitas antarprovinsi, serta pusat kegiatan perdagangan dan niaga.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang dirilis oleh BPS Kota Pekanbaru dalam Pekanbaru Dalam Angka 2024, PDRB Kota Pekanbaru tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 195 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%, menunjukkan pemulihan pascapandemi COVID-19 yang cukup stabil. Kontribusi terbesar PDRB Pekanbaru berasal dari sektor perdagangan (24,35%), diikuti sektor konstruksi (17,89%), serta sektor transportasi dan pergudangan (11,42%).

Selain sektor jasa dan niaga, pembangunan infrastruktur juga mengalami kemajuan pesat. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui berbagai program strategis telah membangun dan merehabilitasi jalan kota, drainase, sarana pendidikan, serta fasilitas pelayanan publik. Salah satu inisiatif pembangunan terbesar adalah pengembangan Kawasan Kota Baru Tenayan Raya yang dirancang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru dengan pendekatan smart city.



Tabel 4.1-4 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2023

| No | Sektor Ekonomi | Persentase Kontribusi (%) |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Perdagangan Besar dan Eceran | 24,35% |
| 2 | Konstruksi | 17,89% |
| 3 | Transportasi dan Pergudangan | 11,42% |
| 4 | Industri Pengolahan | 10,17% |
| 5 | Jasa Pendidikan | 6,38% |
| 6 | Administrasi Pemerintahan | 5,72% |
| 7 | <i>Real Estat</i> | 4,95% |
| 8 | Informasi dan Komunikasi | 4,18% |
| 9 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,96% |
| 10 | Lain-lain (Pertanian, dll.) | 10,98% |

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka 2024

© **taik iput min** **UNS**
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Bahan ini adalah hasil kerja ilmiah dan dilindungi hukum.
Dilarang mengkopas, menyalin, atau
menyebarluaskan tanpa izin.
1. Tingkat kesehatan di Padangsidimpuan pada tahun 2023 mencapai 80,54 poin, yang tergolong dalam kategori tinggi. Hal ini mencerminkan capaian positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup layak. Di sisi lain, tingkat kemiskinan relatif rendah, yakni sebesar 11% menunjukkan kinerja sosial ekonomi kota yang cukup stabil dibandingkan dengan kota besar lainnya di Sumatera.

1. Larang mengelipit sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pekalongan untuk tanya tentang pengertian pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tilik.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Larang mendektip sebagian atau Taburuh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2&3. Penyalipan dananya untuk Depenungan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Tabel 4.1-5 Perkembangan Infrastruktur Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023

| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang No. 16 | Jenis Infrastruktur | Jumlah/Volume Pembangunan | Keterangan |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendantumkan dan menyebutkan sumbernya. a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisankarya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau senjauhnya suatu masalah. | Panjang Jalan Kota | ± 1.523 km | Termasuk jalan aspal, beton, dan tanah |
| 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | Ruas Jalan Diperbaiki | 97 ruas | Termasuk di wilayah Marpoyan, Tampan |
| | Gedung Sekolah Baru | 21 unit | Jenjang SD dan SMP |
| | Puskesmas dan Pustu | 35 unit | Pelayanan dasar kesehatan masyarakat |
| | Jaringan Air Bersih | | 12 proyek instalasi baru |
| | Drainase dan Saluran Kota | 182 titik perbaikan | Untuk mengatasi banjir dan genangan air |
| | Kantor Pemerintahan Baru | Kawasan Tenayan Raya | Pusat administrasi baru Kota Pekanbaru |

Sumber: Dinas PUPR dan Bappeda Kota Pekanbaru, 2023.

4.1. Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Infrastruktur dan pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru terus melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan pelayanan administratif berbasis digital.



Pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kota yang modern, inklusif, dan

- berkelanjutan. 

Dalam bidang transportasi, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antarkecamatan, serta mendukung mobilitas ekonomi dan sosial. Panjang jalan kota pada tahun 2023 tercatat mencapai 1.500 km, terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Sebagian besar jalan telah beraspal, meskipun masih terdapat beberapa titik yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas.

Di sektor kesehatan, terdapat sebanyak 21 Puskesmas dan lebih dari 40 Pustu (Puskesmas Pembantu) yang tersebar di berbagai kecamatan. Selain itu, rumah sakit umum daerah (RSUD) dan beberapa rumah sakit swasta juga menyediakan layanan kesehatan sekunder dan tersier. Ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, bidan, dan perawat terus ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.

Pelayanan pendidikan juga menjadi prioritas pembangunan. Tercatat lebih dari 300 sekolah negeri dan swasta yang tersebar di Kota Pekanbaru, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pemerintah daerah terus memperkuat aksesibilitas dan kualitas pendidikan melalui rehabilitasi sekolah, pengadaan fasilitas belajar, serta peningkatan kualitas guru.

Dalam pelayanan administrasi publik, Kota Pekanbaru mulai mengimplementasikan sistem *e-Government* melalui digitalisasi layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan arsip pemerintahan menggunakan aplikasi SRIKANDI, sebagai bagian dari transformasi birokrasi digital nasional. Hal ini



mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan secara cepat, efisien, dan efisien.

Tabel 4.1-6 Jenis Pelayanan Publik Kota Pekanbaru dan Ketersediaannya

| No | Jenis Pelayanan Publik | Jumlah/Lokasi |
|----|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Pukesmas | 21 Unit |
| 2 | Puskesmas Pembantu (Pustu) | 40+ Unit |
| 3 | Rumah Sakit Umum/Swasta | 15+ Unit |
| 4 | Sekolah Dasar (SD) | 180+ Unit |
| 5 | Sekolah Menengah (SMP/SMA) | 120+ Unit |
| 6 | Kantor Lurah dan Kecamatan | 98 Unit total |
| 7 | Mall Pelayanan Publik (MPP) | 1 lokasi (Tenayan Raya) |
| 8 | Layanan Digital (SRIKANDI) | Digunakan seluruh OPD |

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Diskominfo Kota Pekanbaru, 2023.

4.2. Sejarah Ringkas Kecamatan Tuah Madani

Kecamatan Tuah Madani merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran administratif dari Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pembentukan kecamatan ini tidak terlepas dari dinamika perkembangan wilayah Kota Pekanbaru yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik secara signifikan, sehingga memerlukan penataan ulang wilayah administratif guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Secara yuridis, Kecamatan Tuah Madani dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah atau suatu
masalah.



Kota Pekanbaru. Peraturan ini menjadi dasar hukum pemekaran beberapa kelurahan

1. Kecamatan, termasuk di dalamnya pembentukan Kecamatan Tuah Madani yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Tampan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Ketentuan penggunaan kerja dilindungi undang-undang
dan Pengertian hanya berkenaan dengan makna filosofis yang mendalam, di mana kata "Tuah" mencerminkan
keberkahan dan kemajuan, sedangkan "Madani" berasal dari istilah
Arab yang berarti peradaban, keteraturan, dan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Pemilihan nama ini mencerminkan cita-cita pembangunan daerah yang tidak hanya
berakar pada nilai-nilai budaya dan religius.

Secara historis, wilayah Kecamatan Tuah Madani merupakan daerah yang pesat, terutama setelah adanya peningkatan pembangunan di sektor pendidikan, pemukiman, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Nama "Tuah Madani" mengandung makna filosofis yang mendalam, di mana kata "Tuah" mencerminkan keberkahan dan kemajuan, sedangkan "Madani" berasal dari istilah Arab yang berarti peradaban, keteraturan, dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Pemilihan nama ini mencerminkan cita-cita pembangunan daerah yang tidak hanya berakar pada nilai-nilai budaya dan religius.

Dalam konteks administratif, Kecamatan Tuah Madani terdiri dari beberapa kelurahan, antara lain Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Sidomulyo Barat, dan beberapa wilayah pemekaran lainnya yang sebelumnya termasuk dalam Kelurahan Pejuk Karya dan Simpang Baru. Luas wilayah Kecamatan Tuah Madani mencapai ±70 km² dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 90.000 jiwa berdasarkan estimasi data tahun 2023.

Kecamatan ini secara bertahap mengembangkan infrastruktur pendukung pemerintahan seperti kantor camat, kantor kelurahan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta ruang publik. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menjadikan Kecamatan Tuah Madani sebagai salah satu wilayah strategis untuk pengembangan kawasan pemukiman dan kegiatan ekonomi menengah ke bawah, termasuk melalui kajian suatu masalah.



implementasi program pemberdayaan seperti UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan

1. Dilarang mengutip hak cipta tanpa izin.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2-1 Kronologi Sejarah Pembentukan Kecamatan Tuah Madani

| Tahun | Peristiwa Utama | Keterangan |
|---|--|---|
| 2015 Tanda Undang-Undang Hak Cipta | Wilayah berada di bawah administrasi Kecamatan Tampan | Wilayah ini mencakup Tuah Karya, Simpang Baru, dan Sidomulyo Barat |
| 2016 a. Pengutipan hanya untuk keperluan karya tulis ini b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | Diterbitkannya Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan di Pekanbaru | Dasar hukum pemekaran wilayah baru termasuk pembentukan Kecamatan Tuah Madani |
| 2017 Lanjutkan pencantuman | Pembentukan dan pengoperasian Kantor Camat Tuah Madani secara resmi dimulai | Dilakukan penyesuaian struktur kelembagaan pemerintahan tingkat kecamatan |
| 2018-2023 Karya ilmiah, penelitian, penulisan | Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Tuah Madani | Termasuk pembangunan kantor lurah, puskesmas, dan fasilitas pendidikan |
| 2020-2023 Penyusunan laporan | Penerapan digitalisasi administrasi kelurahan melalui aplikasi SRIKANDI | Implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik |

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari Perda No. 4 Tahun 2016, BPS Pekanbaru (2024), dan dokumentasi pemerintahan Kelurahan Tuah Madani

4.3. Sejarah Ringkas Kelurahan Sidomulyo Barat

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kelurahan ini memiliki sejarah perkembangan administratif yang erat kaitannya dengan dinamika pertumbuhan Kota Pekanbaru, khususnya akibat ekspansi kawasan permukiman, serta masalah.



pesatnya pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih

- terdesentralisasi.

Awalnya, wilayah Sidomulyo Barat merupakan bagian dari Kelurahan Sidomulyo yang berada di bawah administrasi Kecamatan Tampan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan pemekaran wilayah melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan. Berdasarkan regulasi tersebut, wilayah Sidomulyo dimekarkan menjadi dua kelurahan, yaitu Sidomulyo Timur dan Sidomulyo Barat. Pemekaran ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelayanan administrasi, pemerataan pembangunan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Secara geografis, Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki lokasi yang strategis karena berada di kawasan perlintasan utama yang menghubungkan pusat kota Pekanbaru dengan wilayah-wilayah pinggiran. Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Simpang Baru di sebelah utara, Kelurahan Tuah Madani di sebelah selatan, dan wilayah Kelurahan Air Dingin di sebelah barat. Dengan luas wilayah ± 6,2 km² dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 15.000 jiwa, Sidomulyo Barat menjadi salah satu kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tuah Madani.

Kelurahan ini memiliki visi dan misi yang menjadi arah pembangunan masyarakat di tingkat lingkungan, yaitu:



Visi:

- Dengan semangat kebersamaan RT/RW, terwujudnya rasa gotong royong, keamanan dan lingkungan, dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat."

Misi:

Meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan antar sesama RT dan RW.

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan merata.

Menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan RT dan RW.

Dalam aspek pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Sidomulyo Barat termasuk aktif dalam mengembangkan program-program sosial ekonomi seperti Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP).

Program ini telah berjalan sejak tahun 2006 dan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengakses modal usaha secara bergulir. Keberadaan kantor UEK-Sidomulyo menjadi bagian penting dalam sejarah sosial-ekonomi kelurahan ini karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selain itu, secara kelembagaan, Kelurahan Sidomulyo Barat telah dilengkapi dengan kantor pelayanan administrasi, posyandu, rumah ibadah, sekolah dasar dan menengah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu. Struktur kepemerintahan kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh staf pelaksana administrasi dan ketua RT/RW sebagai ujung tombak dalam pengelolaan wilayah masyarakat.



Tabel 4.3-1 Kronologis Perkembangan Kelurahan Sidomulyo Barat

| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | Tahun | Peristiwa Utama | Keterangan |
|---|----------------|---|---|
| Hasil Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar | 2016 | Wilayah merupakan bagian dari Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan | Belum ada pemekaran kelurahan |
| | 2016 | Ditetapkannya Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 | Pemekaran menjadi Sidomulyo Timur dan Sidomulyo Barat |
| | 2017 | Operasionalisasi Kantor Lurah Sidomulyo Barat | Penempatan lurah definitif dan pembentukan struktur pelayanan administrasi |
| | 2016 -Sekarang | Berjalannya Program UEK-SP di Sidomulyo Barat | Memberikan pinjaman usaha masyarakat kecil dan menengah |
| | 2018-2023 | Peningkatan infrastruktur dan pelayanan masyarakat | Pembangunan jalan lingkungan, rehabilitasi kantor, dan digitalisasi layanan |
| | 2021 | Digunakannya aplikasi SRIKANDI oleh kantor kelurahan | Digitalisasi surat-menurut dan pengarsipan elektronik |

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari Perda No. 4 Tahun 2016, data UEK-SP Sidomulyo

Berdasarkan sumber: (2021), dan dokumen skripsi Febri Nadia (2021)

4.4. Sejarah Ringkas Kelurahan Tuah Karya

Kelurahan Tuah Karya merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kelurahan ini memiliki sejarah perkembangan administratif yang erat kaitannya dengan dinamika pertumbuhan Kota Pekanbaru, terutama akibat ekspansi kawasan permukiman, pesatnya pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih terdesentralisasi.

Berdasarkan sumber: (2021), dan dokumen skripsi Febri Nadia (2021)

Hasil Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Awalnya, wilayah Tuah Karya merupakan bagian dari Kelurahan Simpang Baru yang berada di bawah administrasi Kecamatan Tampan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran wilayah melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan. Berdasarkan regulasi tersebut, wilayah Kelurahan Simpang Baru dimekarkan dan salah satu hasilnya adalah pembentukan Kelurahan Tuah Karya. Pemekaran ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelayanan pemerataan pembangunan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang baru dibentuk.

Perkembangan berikutnya, Kelurahan Tuah Karya yang memiliki wilayah sangat luas terus mengalami pertumbuhan. Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemekaran Kelurahan, di mana Kelurahan Tuah Karya dimekarkan lagi menjadi beberapa kelurahan baru, yaitu Kelurahan Sialangmunggu dan Kelurahan Tuah Madani. Pemekaran pada tahun 2016 ini kembali bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat setempat.

Secara geografis, Kelurahan Tuah Karya memiliki lokasi yang strategis karena berada di jalur pintu masuk utama menuju Kota Pekanbaru dari arah provinsi tetangga. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Simpang Baru di sebelah utara, wilayah Kabupaten Kampar di sebelah selatan, Kelurahan Sialangmunggu di sebelah timur, dan Kelurahan Tuah Madani di sebelah barat. Dengan luas wilayah sekitar ±7,2 km² dan jumlah penduduk lebih dari 38.000 jiwa, Tuah Karya menjadi salah satu



Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tuah Madani.

1. Dibangunnya angka pertumbuhan penduduk di kawasan ini tidak lepas dari perannya dalam pengembangan kawasan permukiman dan usaha yang diminati pendatang dari luar Kota Pekanbaru maupun luar Provinsi Riau.
2. Dilarang mengumpulkan barang-barang hasil produksi atau seluruh karya intelektual untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Kelurahan ini memiliki visi dan misi yang menjadi arah pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan, yaitu:

Visi :

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tuah Karya".

Misi :

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didasarkan pada potensi sumber daya aparatur;

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta wilayah yang berwawasan luas;

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan ketertiban umum;

Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan religius dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kelurahan tuah karya.

Dalam aspek pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Tuah Karya termasuk aktif dalam mengembangkan program-program sosial-ekonomi, salah satunya melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP).

Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dan bertujuan untuk membantu Program ini dalam menyelesaikan suatu masalah.



masyarakat dalam mengakses modal usaha secara bergulir. Keberadaan Koperasi

- UEK-SP Tuah Karya menjadi bagian penting dalam sejarah sosial-ekonomi
 Kelurahan ini karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemandirian
 ekonomi warga setempat.

Selain itu, secara kelembagaan, Kelurahan Tuah Karya telah dilengkapi
 dengan kantor pelayanan administrasi kelurahan, sarana kesehatan seperti posyandu
 dan speskesmas pembantu, rumah ibadah, serta fasilitas pendidikan berupa sekolah
 dasar dan menengah. Struktur pemerintahan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah
 yang dibantu oleh staf pelaksana administrasi, serta didukung oleh ketua RT/RW
 sebagai ujung tombak dalam pengelolaan dan pelayanan masyarakat di lingkungan
 kelurahan.

Tabel 4.4-1 Kronologis Perkembangan Kelurahan Tuah Karya

| Tahun | Peristiwa Utama | Keterangan |
|---|---|--|
| 2003 menyebutkan sumber: penulisan kritis atau penilaian | Wilayah merupakan bagian dari Kelurahan Simpang Baru, Kec. Tampan | Belum ada pemekaran, masih bergabung dengan Kel. Simpang Baru |
| 2003 menyebutkan sumber: penulisan laporan, | Ditetapkannya Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 | Pembentukan Kelurahan Tuah Karya (pemekaran dari Kel. Simpang Baru) |
| 2004 | Operasionalisasi Kantor Lurah Tuah Karya | Penempatan lurah definitif pertama dan pembentukan struktur pelayanan administrasi kelurahan |
| 2011 -Sekarang dianauan suatu masalah. | BeBerjalannya Program UEK-SP di Kelurahan Tuah Karyarjalannya Program | Memberikan pinjaman usaha bagi masyarakat kecil dan menengah secara bergulir |



| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | |
|--|--|
| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 2016 Dilarang mengutip 2016 a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar | UEK-SP di Sidomulyo Barat Ditetapkannya Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 Peningkatan infrastruktur dan pelayanan masyarakat Digunakannya aplikasi SRIKANDI oleh kantor kelurahan |
| 2023 bagian atau 2016 diluruh karya tulis ini tanpa pencantumkan sumber, penulis, kaitan dengan pendidikan, penelitian, penulisan karyanya atau atas 8 RW dan 31 RT dibutuhkan adanya satu forum resmi yang dapat menjadi jembatan komunikasi antarstruktur wilayah dan pemerintah kelurahan. Berdasarkan informasi dari dokumentasi kelurahan serta praktik kelembagaan lokal, Forum | Pemekaran Kel. Tuah Karya menjadi Kelurahan Sialangmunggu dan Kelurahan Tuah Madani Pembangunan jalan lingkungan, rehabilitasi kantor lurah, dan digitalisasi layanan administrasi Digitalisasi surat-menyerat dan sistem pengarsipan elektronik |

Sumber: *Diolah Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari Perda No. 4 Tahun 2003, Perda No. 4 Tahun*

2016 data UEK-SP Tuah Karya (2021), dan Dokumen Profil Kelurahan Tuah Karya (2019).

3.5. Sejarah Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan Tuah Karya

Forum Komunikasi RT/RW (FK RT/RW) merupakan wadah koordinatif yang dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah kelurahan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan sinergi antara pemerintah dan warga di tingkat paling bawah, yaitu lingkungan RT dan RW. Di Kelurahan Tuah Karya, pembentukan Forum Komunikasi RT/RW tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan bertambahnya jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Tuah Karya yang kini terdiri atas 8 RW dan 31 RT dibutuhkan adanya satu forum resmi yang dapat menjadi jembatan komunikasi antarstruktur wilayah dan pemerintah kelurahan. Berdasarkan informasi dari dokumentasi kelurahan serta praktik kelembagaan lokal, Forum

masalah.



UIN SUSKA RIAU

Komunikasi RT/RW Kelurahan Tuah Karya pertama kali dibentuk secara resmi pada

1. Dengan mengacu pada arahan dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui
Pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama dari dibentuknya forum ini adalah untuk:

- a. Mengalihkan aspirasi masyarakat dari tingkat lingkungan ke kelurahan,
- b. Mendorong partisipasi warga dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan,
- c. Mendukung program-program pemerintah seperti pendataan pendudukan, kebersihan, keamanan lingkungan, dan digitalisasi pelayanan.

Sejak dibentuk, forum ini secara aktif berperan dalam kegiatan musyawarah kelurahan, pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), serta pengaluran bantuan sosial dan pengelolaan data warga. Dalam beberapa tahun terakhir, Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan Tuah Karya juga terlibat dalam penyuluhan dan sosialisasi program nasional seperti pendaftaran BPJS, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelaksanaan SRKANDI, serta kegiatan gotong royong skala kelurahan.

UIN SUSKA RIAU



Tabel 4.5-1 Kronologi Perkembangan Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan

Tuah Madani

| Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan pengaruh dan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | Peristiwa Utama Pemekaran Kelurahan Tuah Madani Penataan ulang RT dan RW Pembentukan resmi Forum Komunikasi RT/RW Musyawarah perdana secara kelembagaan Forum berperan aktif dalam distribusi bantuan COVID-19 Forum ikut serta dalam pelatihan digitalisasi layanan Revitalisasi struktur organisasi Forum Komunikasi | Keterangan Terbentuk dari Tuah Karya & Simpang Baru, mulai terbentuk struktur RT/RW Penyesuaian struktur wilayah menjadi 8 RW dan 31 RT Ditetapkan melalui SK Lurah Tuah Madani dan difasilitasi oleh kecamatan Dibahas agenda pembangunan wilayah dan sistem informasi RT/RW Bekerja sama dengan kelurahan dan Dinas Sosial Mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI dan layanan kependudukan online Penambahan sub-koordinator bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan |
|---|---|---|--|
| 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | | | |

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan dari dokumen kelurahan, laporan kegiatan RT/RW, dan

praktik umum kelembagaan lingkungan Kota Pekanbaru

- 5.4. Kesimpulan**
1. Dilarang pengujian sebagai faktor penghambat implementasi Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pengujian hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisankarya ilmiah, penyebarluasan informasi dan media publik sunnah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan serta faktor-faktor penghambat implementasi Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Implementasi Forum Komunikasi RT/RW Kecamatan Tuah Madani secara Pelaksanaan Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani secara kurang maksimal sebagaimana tujuan pembentukannya. Forum ini belum sepuhnya berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyalur aspirasi masyarakat di tingkat RT dan RW. Implementasi program kerja lebih banyak bersifat insidental, cenderung fokus pada kegiatan sosial seperti gotong royong dan pembinaan lingkungan, dan belum menyentuh aspek strategis seperti pelatihan administrasi literasi digital (*Cyber Education*), maupun sosialisasi aplikasi pelayanan publik (E-Lapor). Selain itu, pemahaman ketua RT/RW terhadap tujuan dan peran forum juga masih rendah; sebagian besar pengurus memaknai forum hanya sebagai ruang silaturahmi, bukan sebagai instrumen perumusan kebijakan dan solusi partisipatif di masyarakat. Kesesuaian antara program forum dan kebutuhan masyarakat pun belum tercapai secara maksimal, karena masih minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program.



b) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Forum Komunikasi RT/RW

1. Kecamatan Tuah Madani

Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat pelaksanaan forum komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani, yaitu:

1. Terbatasan sumber daya berupa minimnya anggaran operasional, ketiadaan kerangka pelatihan atau bimbingan teknis bagi pengurus, serta fasilitas yang sangat terbatas sehingga menghambat pengembangan dan keberlanjutan program kerja forum.

2. Lemahnya komunikasi antar badan pelaksana, ditandai dengan intensitas rapat koordinasi yang rendah, tidak adanya sistem alur informasi dan dokumentasi yang akku, serta miskomunikasi antara forum, kelurahan, dan kecamatan. Penyampaian instruksi dan informasi sering bersifat informal dan tidak terdokumentasi, sehingga menurunkan akuntabilitas dan efektivitas koordinasi.

3. Karakteristik organisasi forum yang secara formal telah terbentuk melalui SK lembah, namun belum diikuti oleh budaya kerja yang profesional. Banyak pengurus yang pasif, kurang disiplin, dan tidak menjalankan peran sesuai job description. Evaluasi dan pengawasan internal juga lemah.

4. Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berpengaruh negatif, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga lokal, serta adanya pengaruh politik lokal yang memperlemah posisi forum sebagai penyalur aspirasi warga secara independen.

5. Sikap pelaksana program forum yang belum menunjukkan komitmen dan tanggung jawab kelembagaan yang tinggi. Keaktifan forum masih sangat dinilai suatu masalah.



bergantung pada motivasi pribadi pengurus, bukan pada sistem kelembagaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh tulisan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© dr. Akhipti milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Judang
Kesimpulan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh tulisan.

a. Pengutipannya untuk

b. Pengutipan tidak merugikan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah Matriks Penghubung berupa tujuan → temuan Bab V →

Kesimpulan:

Tabel 5.1-1 Matriks Penghubung

| Tujuan/Rumusan Masalah | Ringkasan Temuan Utama Bab V | Kesimpulan |
|--|--|---|
| <p>Menganalisis fungsi Forum Komunikasi RT/RW Kecamatan Kuch Madani.</p> <p>Laksanaan/pelaksanaan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, menyebutkan sumber: faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi forum</p> | <p>Bab V menunjukkan implementasi forum kurang maksimal karena fungsi wadah komunikasi atau koordinasi belum berjalan penuh. Program kerja cenderung insidental dan fokus kegiatan sosial. Aspek strategis (pelatihan administrasi, literasi digital/Cyber Education, sosialisasi E-Lapor) belum menyentuh; pemahaman ketua RT/RW masih rendah pelibatan masyarakat minim.</p> | <p>Pelaksanaan Forum Komunikasi RT/RW secara umum kurang maksimal sebagai wadah komunikasi/koordinasi/penyalur aspirasi; kegiatan lebih insidental dan belum menyasar penguatan strategis; pemahaman peran pengurus dan pelibatan warga masih rendah.</p> |
| | | |



| | | |
|--|---|--|
| <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyebarluasan kegiatan, dan penyuluhan lahir, batin, dan sosial. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | <p>kelembagaan, lingkungan sosial-ekonomi-politik, dan sikap pelaksana. Rincinya tampak pada Tabel 5.21 (partisipasi rendah, ketiadaan anggaran, kekosongan kepemimpinan, dominasi kelompok, koordinasi lemah).</p> | <p>pelaksana, kelembagaan belum profesional, pengaruh lingkungan sosial-ekonomi-politik; serta sikap/komitmen pelaksana yang belum kuat.</p> |
|--|---|--|

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani masih tergolong kurang maksimal. Pelaksanaan belum dijalankan secara efektif, ditandai dengan lemahnya aspek perencanaan program, penyediaan sumber daya, komunikasi lintas sektor, dan manajemen organisasi. Seluruh hambatan ini menunjukkan perlunya revitalisasi forum, penguatan kapasitas SDM, dukungan pemerintah kecamatan, serta pelibatan aktif masyarakat agar forum dapat berfungsi secara partisipatif, profesional dan berkelanjutan dalam memenuhi perannya sebagai jembatan komunikasi dan penyalur aspirasi masyarakat di tingkat paling bawah.

5.4. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait agar implementasi Forum Komunikasi RT/RW di Kecamatan Tuah Madani dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.



kecakapan dalam mendukung keberlangsungan dan penguatan kelembagaan forum.

Hal ini dapat dimulai dengan penyusunan pedoman kerja yang jelas, pemberian anggaran operasional minimal, serta pelibatan forum secara aktif dalam rapat-rapat

sebagaimana menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian integral kmerugikan kepada proses pembangunan partisipatif di tingkat lokal.

Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus forum menjadi prioritas. Pelatihan administrasi, manajemen organisasi, komunikasi publik, serta penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan agar forum dapat adaptif dan profesional. Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan atau universitas untuk menyelenggarakan program peningkatan kapasitas tersebut secara berkala.

Ketiga, perlu dibangun sistem komunikasi yang terbuka dan dua arah antara ilmiah, forum, kelurahan, dan kecamatan. Informasi terkait program, kebijakan, maupun agenda pembangunan harus disampaikan secara transparan kepada seluruh pengurus forum agar mereka mampu memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi warga secara konstruktif. Di sisi lain, forum juga harus diberi ruang untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Keempat, struktur organisasi forum perlu dihidupkan kembali dengan pendekatan partisipatif, tidak hanya melalui penerbitan SK formal, tetapi dengan mekanisme pembagian peran yang jelas, pengawasan internal, dan forum evaluasi



UIN SUSKA RIAU

rutin yang melibatkan seluruh pengurus dan warga. Dengan struktur organisasi yang

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
dilakukan agar atau seluruh karya tulis ini tidak
dapat diambil sebagian atau seluruhnya tanpa izin.
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, menulis ulang karya ilmiah, penerjemahan, dan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

, forum akan lebih siap dalam merespons permasalahan lokal secara kolektif.

Kelima, penguatan dukungan sosial dan politik dari tokoh masyarakat

lembaga lokal harus diupayakan. Pemerintah dapat memfasilitasi forum

antara lembaga lokal harus diupayakan. Pemerintah dapat memfasilitasi forum

RT/RW tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan jejaring sosial

lokal yang lebih luas.

Terakhir, diperlukan perubahan pola pikir dan sikap pengurus forum untuk

membangun integritas, tanggung jawab, dan rasa kepemilikan terhadap forum. Forum

menjadi wadah pengabdian, bukan sekadar jabatan simbolik. Dengan

membangun nilai-nilai tersebut, pelaksanaan forum dapat berjalan lebih konsisten,

transparan, akhir, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui serangkaian saran ini, diharapkan implementasi Forum Komunikasi

RW di Kecamatan Tuah Madani dapat ditingkatkan menuju kelembagaan yang

inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang

demokratis di tingkat local.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Penerbit: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Penulis: M. Amin, A. Arifin, dan B. Basronwi
Diterjemah oleh: D. A. B. Brahimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan tidak merugikan Apentingan yang wajib.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. F. (2024). Peranan Forum Rt Dan Rw Dalam Komunikasi Organisasi Pada Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Tobekgodang Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 11(2), 55–63.

A. (2015). Standarisasi dan Dasar Pijakan Etika Komunikasi Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(28), 1-14.

Basronwi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

D. A. B., & Sitepu, E. (2020). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Di Kantor Lurah Gung Leto Kecamatan Kabanjahe. *JURNAL SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(2), 96-104.

Creswell W. John. 2012. Research Design Pendekatan : Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Deshiani, U. (2019). Peran komunikasi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima (pkl). *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2)



- De Vito, Joseph A. *The Interpersonal Communication Book*. Pearson, 2016.
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan mengebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Karima Itu Sebagai Landasan Etika Komunikasi Dalam Dakwah." *Journal Of Islamic Social Science And Communication (JISSC) DIKSI 1.02* (2022)
- Nadia. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Febridi, B. (2023). Cyber Education untuk Forum RT/RW Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2)
- Firmansyah, S.D. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2)
- Gandariani, T. (2019). Perencanaan Krisis PR: Sebuah Upaya Strategi Komunikasi Mengatasi Krisis. *Jurnal Lentera Komunikasi*, 3(1).
- Gandariani, T. (2019). Perencanaan Krisis PR: Sebuah Upaya Strategi Komunikasi Mengatasi Krisis. *Jurnal Lentera Komunikasi*, 3(1).
- Hamid, A. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 23-24 At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam, 6(II).



Handayani, N. A. T., & Jaya, C. K. (2024). Bentuk-Bentuk Etika Komunikasi Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Da'wah*, 3(2), 114-136.

Hartini, A., & Kaliky, Nur, M. (2020). *JUTKEL : Jurnal Telekomunikasi, Kendali dan Listrik*. *JUTKEL: Jurnal Telekomunikasi, Kendali Dan Listrik*, 1(1), 44–51.

Emayani, N., & Kaliky, Nur. *Komunikasi Organisasi: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar, 2020.

Hartini, A., & Mayang Sari, S. *Komunikasi Organisasi: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Junaidi, O. T., & Mayang Sari, I. D. (2019). *Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi Melalui Group Chat Whatsapp Oriflame*. *Jurnal Common*, 3(1), 104–114.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Klaresta, N. (2022). *Peran Komunikasi Organisasi di Kalangan Karyawan Seven Peaks Education*. Jakarta. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, 8(3), 3120-3127.



- Kurniawan, A. (2020). Peran Forum Komunikasi RT/RW dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tuah Madani. Pekanbaru: Universitas Riau.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Mukawati, K., & Rosilawati, Y. (2014). Komunikasi organisasi pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 5(1), 31-41.
- Nabila, A. (2025). Perencanaan Program dan Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Citra Positif di SMA 1 Barunawati Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Sekolah Swasta. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JSTI)*, 7(1), 40–57.
- Nashrulloh, M. A. (2016). Retorika Dakwah Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 8(1), 160-174.
- Nazar, Moh. (2005). Metode Penelitian. Bogor: Galia Indonesia
- Oktaviyani, N., Al Ghazal, S., & Surbiantoro, E. (2022, August). Implementasi Pendidikan dari QS An-Nisa Ayat 9 tentang Quranic Parenting terhadap Qaulan Sadidan. In Bandung Conference Series: Islamic Education (Vol. 2, No. 2, pp. 395-400).
- Pace, R. Wayne, dan Faules, Don F. *Organizational Communication: A Critical Approach*. Sage Publications, 2019.



Pekanbaru, W. (2016). Perda Forum Komunikasi Rt Dan Rw.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Forum Komunikasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pemerintah
Kota Pekanbaru, 2016.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga Tingkat Kelurahan \, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru: Lembaga Studi Sosial, 2022.

Pramono, J. (2020). Implementasi Kebijakan Publik. Solo: UNISRI Press.

[Rahmawati, B. (2021). Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi). Bantul: Moya Zam Zam.

Rauf, M. Teori Lembaga Kemasyarakatan dan Pembangunan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Ratna, R. (2015). Studi Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Wedana*, 1(2), 161–170.

Rifa'i, R. M. (2023). Komunikasi Interpersonal Pegawai dalam Memberikan Pelayanan di Kefurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Uin Suska Riau).



UIN SUSKA RIAU

Robert Tua Siregar. Komunikasi Eksternal dan Internal dalam Organisasi. Universitas Sumatera Utara Press, 2021.

Hardoko, A., & Rachmad, E. (2024). *Implementasi paguyuban dan nilai paguyuban pada forum komunikasi Dayak Lundayeh di Desa Singai Tranggacematan Mentarang Kabupaten Malinau*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, 1(2), 224–232.

Sarmayanti, S., & Haryanto, H. (2017). Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan fakultas kedokteran Universitas Padjadjaran. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 14(1), 96–112.

Siregar, F. A., & Usriyah, L. (2021). Peranan komunikasi organisasi dalam manajemen konflik. Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan), 5(2), 163-174.

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Tachjjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung.

Talib, N. Q., Suparman, S. R., & Pratiwi, P. (2024). *Implementasi kebijakan tim forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Pangkep*. Jurnal Kesehatan Lentera Acitya, 11(1), 14–19.



- Tinc A. Wulandari, M. I. kom. (2016). Aliran Informasi dalam Organisasi Jaringan Komunikasi Formal. Program Studi Ilmu Komunikasi, 1–34
- Gandariani (Ed.). (n.d.). Public Relations dan Manajemen Komunikasi [PowerPoint Slides]. Diakses dari Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (STI), Vol. 07, No. 1, Februari 2025, hlm. 42.
- Siregar, Robert. et al. (2021). Komunikasi Organisasi, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ibrahim, A. (2016). Konsep dasar komunikasi untuk kehidupan. AL IBTIDA': Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 4(2), 30-54.
- N., Suadnya, W., & Sutarini, I. A. (2024). *Komunikasi partisipatif pada organisasi Forum Anak dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram
- Widyanti, R., & Basuki, M. S. (2019). Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid 1. Universitas Islam Kalimantan MAB
- Yudi, D., T., N., & Mukhroji, M. (2023). Prinsip dan Etika Komunikasi Dakwah. ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media, 2(02), 186-197.
- Zulaldi, A., dkk. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi dalam Program Pemerintah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Zulaldi, F., Ferizko, A., & Melinda, S. (2019). Optimalisasi Peran RT/RW dalam Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 112–124.



Zuhdi, S., Ferizko, A., & Melinda, P. (2019). Pengaruh Kelembagaan Rukun Tetangga Rukun Kampung (RT/RW) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1).

- © Rukun Kampung UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Ha**
Cipta
Kilidungji
Undang
S. Z. (2018). Teori Komunikasi Organisasi (Kerangka, Pendekatan, dan Perspektif Teori). *Journal Analytica Islamica*, 7(1), 105-112.
- S. Manusia dan Organisasi: Perspektif Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Kencana, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Deskripsi | Tanggal | Bukti Visual/Dokumentasi |
|--|--|--------------|--------------------------|
| 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | Wawancara dengan ketua LPM sidomulyo barat Bapak Sarjono. SE M.M | 20 juni 2025 | |
| | Wawancara dengan ketua LPS sidomulyo barat Bapak Eddrison | 19 juni 2025 | |



UIN SUSKA RIAU

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| <p>Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>3 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> | <p>Wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Effendi Mpd</p> | <p>19 juni 2025</p> | |
| | <p>Wawancara dengan ketua forum sidomulyo barat Bapak H.Baharuddin S.Sos. M.Si</p> | <p>19 juni 2025</p> | |

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| 5 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | Wawancara dengan ketua forum komunikasi rt rw kelurahan tuan karya Bapak H. Akuan Mukerin State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | 21 June 2025 | |
| 5 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | Wawancara dengan bapak KASI TRANTIP (perwakilan kecamatan) Bapak Tengku Ruzen, SE State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | 17 Juni 2025 | |

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta
1. Dilarang mengungkap sebagian atau seluruh karya penulis tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



PINTA ARISMAN, lahir di Sumur Batu, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 12 April tahun 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Masri dan Ibu Risnawati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 01 Batu Balang pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kecamatan Harau dan tamat tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kecamatan Harau dan berhasil menyelesaiannya pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara (S1). Selama perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2023 di Kantor Polres Lima Puluh Kota. Kemudian pada tahun 2024, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Pada tanggal 17 September 2025, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) setelah melewati Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.